

SKRIPSI

**RESILIENSI MASYARAKAT PASCA BENCANA ALAM GEMPA DI
KABUPATEN MAMUJU**



Disusun Oleh:
DIAN ALFIANI
105641108220

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**RESILIENSI MASYARAKAT PASCA BENCANA ALAM GEMPA DI
KABUPATEN MAMUJU**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan (S. IP)



Disusun dan diajukan oleh

Dian Alfiani

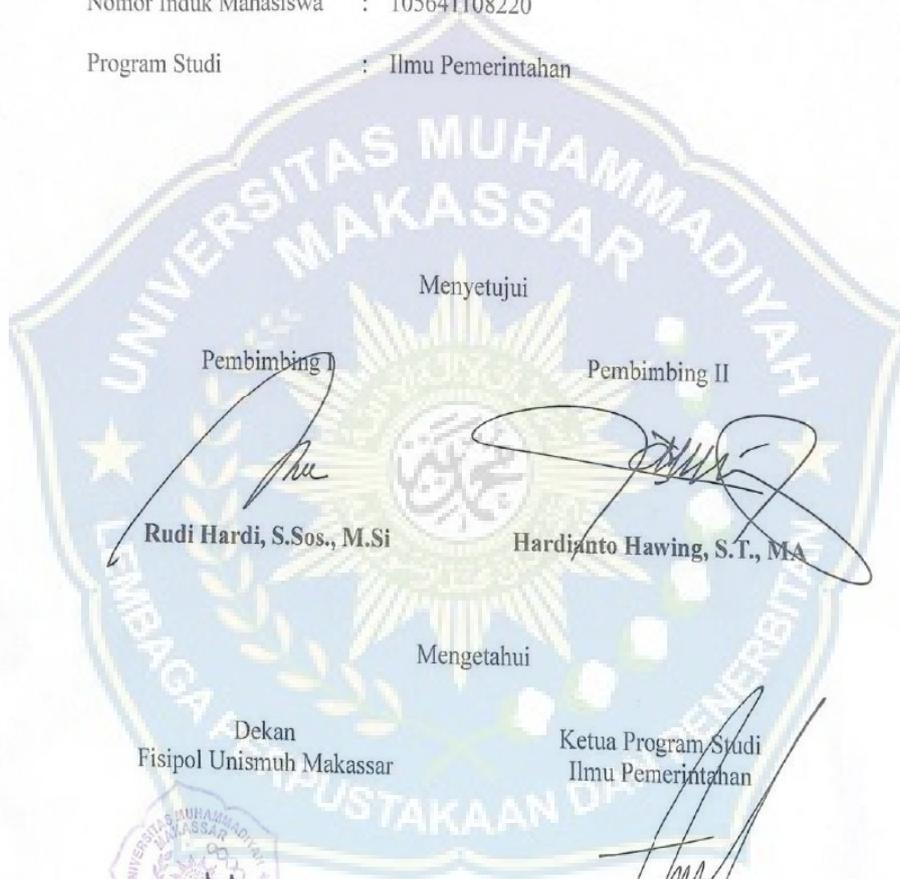
Nomor stambuk :105641108220

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam
Gempa Di Kabupaten Mamuju
Nama Mahasiswa : Dian Alfiani
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

[Signature]
Hardianto Hawing, S.T., MA

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727



Ahmad Harakan S.IP., M.H.I
NBM : 1207163

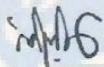
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor 0283/FSP/A.4-II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa, Tanggal 30 juli 2024

Mengetahui

Ketua

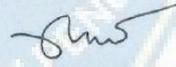
Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

Tim Penguji

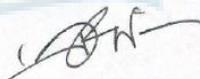
1. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

()

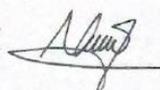
2. Dr. H. Ansyari Mone, M.Pd

()

3. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

()

4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

()



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dian Alfiani
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108220
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa
Di Kabupaten Mamuju

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima saksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Dian Alfiani

ABSTRAK

Dian Alfiani. 2024. Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju, (dibimbing oleh Rudi Hardi dan Hardianto Hawing).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data yaitu data primer dan sekunder, informan terdiri dari 5 orang yang terdiri dari BPBD Kabupaten Mamuju, Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Korban Bencana, dan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa, yaitu Resiliensi masyarakat dengan cara peningkatan sosialisasi program-program pengurangan resiko bencana. Resiliensi pangan, peningkatan pangan lokal yang bergizi. Resiliensi ekonomi, terjadi peningkatan usaha mikro, hal ini terlihat dari persentase UMKM dari 60% pada tahun 2022 menjadi 70% pada tahun 2023. Resiliensi sosial dan kesehatan, beberapa infrastruktur dibangun kembali, akan tetapi masih banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak dan pencaharian yang stabil.

Kata kunci: Resiliensi, Masyarakat, Gempa Bumi, Tata Kelola, Bencana Alam.

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju.”** skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orangtua tercinta ayahanda Sahrudin dan ibunda Murni, dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih untuk doa, cinta, dan segala bentuk kepercayaan yang diberikan. Terimakasih karena telah menjadi orangtua hebat bagi ke 4 anaknya, Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
2. Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan bapak Hardianto Hawing, S.T., MA selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelola fakultas dengan sebaik-baiknya.
4. Ayahanda Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.

6. Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan seluruh informan yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Kepada cinta kasih ketiga saudara kandung saya, kakanda Zamroni Arifin, ATT III, kakak perempuan saya Rofi Supiani S.Keb dan adik perempuan saya Lili Roliyani yang selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu membantu penulis dalam hal apapun,
8. Sahabatku tercinta sekaligus saudara tak sedarahku Riska Ikbal S.Ip, terimakasih telah mendukung penulis di hari yang tidak mudah selama mengerjakan tugas akhir, telah bersedia meluangkan waktu, perhatian, dan selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah, terimakasih untuk setiap episode perkuliahan yang kita lewati bersama.
9. Saudara-saudara seperjuangan yaitu Satu Referensi Riska Ikbal S.Ip, Sukma Ayu S.Ip, Ainul Maghfirah S.Ip, Nur Istiqomah S.Ip dan Nurhaliza. Terimakasih telah mendukung dan menyemangati penulis selama melakukan tugas akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan kelas IP C, terimakasih untuk kebersamaan yang telah terjalin selama ini selama penulisan berada di bangku perkuliahan.
11. Kepada sahabatku dibangku SMA yaitu Ade Irma S.kom, Sri Wahyuni S.Gz dan Muhammad Danil yang selalu menyemangati dan membantu penulis terutama selama melakukan penelitian.
12. Kepada Tolang Papuk Balok, Sri Mulyana S.keb dan Sukma Wati. Terimakasih telah menghibur hari-hari penulis selama dalam melakukan tugas akhir.
13. Terakhir, untuk diri sendiri, terimakasih sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam tantangan namun tetap memilih tegak dan kuat. Terimakasih sudah bertahan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Makassar 03 September 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dian Alfiani', written over a faint horizontal line.

Dian Alfiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM.....	iii
SURAT PERNTAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep Dan Teori.....	12
1. Bencana Alam.....	12
2. Tata Kelola Bencana Alam.....	14
3. Resiliensi Masyarakat.....	24
C. Kerangka Pikir.....	36
D. Fokus Penelitian.....	38
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	41
a. Waktu Penelitian.....	41
b. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Informasi Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	47

B. Hasil Penelitian.....	62
C. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Klaster Tata Kelola Risiko Bencana, Resiliensi Masyarakat	11
Tabel 2.4 Kerangka Pikir	39
Tabel 3.1 Informan Penelitian	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2024	51
Tabel 4.4: luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mamuju Tahun 2024	52
Tabel 4.5 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju.....	53
Tabel 4.6 Nama dan Jabatan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju	54
Tabel 4.7 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju	55
Tabel 4.8 Nama dan Jabatan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju	55
Tabel 4.9 Data Kebijakan Bencana Dari Tahun 2017-2021	60
Table 4.10 Matriks Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju.....	62
Tabel 4.11 Sumber Dana Bantuan Dari Masyarakat	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penanggulangan Bencana	2
Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu Menggunakan Aplikasi Vosviewer	8
Gambar 2.2 <i>Overlay Visualization vosviewer</i>	9
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Mamuju	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

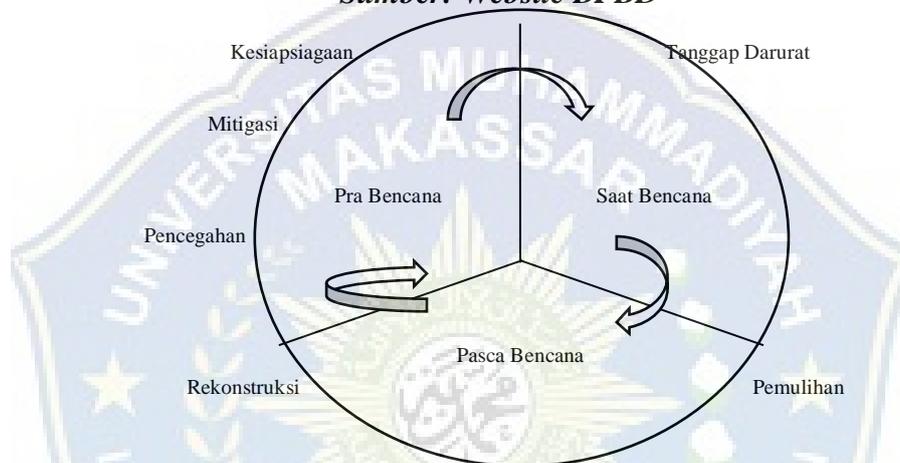
Indonesia merupakan negara dengan yang memiliki banyak potensi bencana, setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi penyebab potensi bencana di Indonesia. Pertama, Posisi Indonesia dikenal berada di wilayah Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) sepanjang 40.000 km, hal ini berimplikasi pada potensi gempa bumi, gempa bumi dan Tsunami, juga tanah longsor terjadi di Indonesia. Kedua, secara geografis wilayah Indonesia memiliki potensi yang besar akan bencana karena posisi Indonesia sendiri yang berada di pertemuan tiga lempeng dunia yakni Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, hal ini juga berimplikasi terjadinya gempa dan Tsunami di Indonesia, selain itu pergerakan lempeng juga dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur lain, seperti jalan dan bangunan. Ketiga, Indonesia terletak di *Alpide Belt*, yang merupakan jalur gempa nomor dua paling aktif di dunia, wilayah yang termasuk dalam sabuk *Alpide* diantaranya Jawa, Sumatera, Himalaya, Mediterania dan Antartika. Keempat, iklim tropis di Indonesia juga menjadi penyebab potensi bencana terjadi, misalnya banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, potensi ini dapat diperbesar jika tidak ada kesadaran saling menjaga dari masyarakat Indonesia (Febriyanto, 2019).

Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 2018-2019 sudah mencatat sebanyak 3003 kejadian bencana, yang menimbulkan kerugian jiwa dan fisik, serta ekonomi. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, bukan

hanya bagi para korbannya, tetapi juga mereka yang terdampak langsung dengan bencana, dikarenakan bencana dapat menimbulkan multiplier *effect* ke aspek-aspek lain secara lebih luas, dalam beberapa kasus yang terjadi pada bencana besar, membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi seperti semula.

Gambar 1.1 Alur Penanggulangan Bencana

Sumber: Website BPBD



Penanggulangan bencana di Indonesia merujuk pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdiri atas tiga tahap pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Pemerintah 2020).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 10.519 gempa bumi terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Terdiri dari gempa dengan intensitas berbeda, mulai dari gempa kecil hingga besar. Gempa bumi yang melanda

Sulawesi Barat pada tahun 2021 yang juga berdampak signifikan di Kabupaten Mamuju, termasuk gempa terparah yang pernah tercatat (Novia 2022).

Proses pemulihan pasca bencana menjadi penting dalam mengembalikan kehidupan masyarakat pasca bencana. Prinsip “*building back better*” perlu diterapkan di dalam proses pemulihan pasca bencana, yaitu dengan membangun kembali kehidupan masyarakat melalui pengurangan kerentanan dan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh pada proses pemulihan melalui perencanaan pembangunan kembali pasca bencana (*post disaster recovery planning*), sehingga pemulihan dapat lebih baik dan lebih cepat (Pemerintah 2020).

Terkait bidang kebencanaan, masih banyak dijumpai berbagai permasalahan. Isu penanggulangan bencana belum menjadi isu prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). Potensi ancaman bencana baru sebatas dijabarkan dalam aspek geografis dan demografis namun belum diangkat menjadi isu strategis pembangunan daerah. Belum lagi munculnya *conflict of interest* antar pejabat daerah dalam pengelolaan dana bantuan berpola hibah. Permasalahan lain terkait payung hukum dan aturan turunan yang mengatur proses penanggulangan bencana dimana belum semua wilayah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana. Laporan Bappenas tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat 34 BPBD di Provinsi sementara di Kabupaten/ Kota terdapat 427 BPBD di seluruh Indonesia (Risaty 2020).

Namun payung hukum pembentukan BPBD kabupaten/kota sangat bervariasi, ada yang dibentuk melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Berdasarkan status kelembagaan BPBD sampai dengan bulan Juni 2014, 43 BPBD diantaranya dibentuk dengan Peraturan Bupati/Walikota, sedangkan 384 BPBD lainnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, hal ini diperparah dengan belum adanya SOP (Standard Operational Procedure) yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten/ Kota dan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, hal ini menyebabkan substansi dan proses penanggulangan bencana dapat memberikan kesempatan kepada lembaga eksekutif (Kepala Daerah, SKPD, DPRD) di daerah untuk menyamakan persepsi tentang tanggungjawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, padahal dengan payung hukum yang jelas tentang penanggulangan bencana ternyata sangat mendukung komitmen Kepala Daerah, SKPD dan DPRD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sistematis yang diterjemahkan dalam prosedur tetap penanggulangan bencana. Pada daerah yang telah membentuk BPBD namun belum memiliki payung hukum penanggulangan bencana di daerah, program aksi yang dilakukan pada umumnya bersifat responsif. Permasalahan lain yakni sulitnya memaksimalkan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah, lembaga donor dan LSM dalam upaya penanggulangan bencana (Risaty 2020).

Kabupaten Mamuju yang berada di Provinsi Sulawesi Barat sering dilanda gempa bumi yang dapat membahayakan kehidupan dan infrastruktur setempat. Untuk mengurangi risiko dan meningkatkan Resiliensi Masyarakat Pasca

Bencana Alam Gempa, penting untuk memahami bagaimana pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan manajemen risiko bencana. Dalam masalah penanggulangan bencana perkotaan harus dipertimbangkan dalam perspektif jangka panjang karena dampak perubahan iklim tidak dapat diprediksi dan kompleks, khususnya pada peningkatan Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa daerah. Menghadapi tantangan yang demikian, beberapa kota di dunia telah mengembangkan tata kelola kota tangguh bencana dan telah berhasil masuk dalam kategori kota tangguh bencana.

Gempa tektonik yang terjadi pada awal tahun ini merupakan salah satu gempa terdahsyat dan dirasakan hampir di seluruh Provinsi Sulawesi Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 SR terjadi pada Jumat 15 Januari 2021, 6kilometer timur laut Majene, Sulawesi Barat. Gempa yang terjadi pada kedalaman 10 km ini dirasakan hingga wilayah Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, dan Mamasa. Namun Kabupaten Majene dan Mamuju mengalami kerusakan paling parah. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa M 6,2 yang melanda Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021 telah mengakibatkan lebih dari 100 korban jiwa, dengan lebih dari 7.800 rumah rusak dan sekitar 37.000 orang mengungsi. Gempa ini bukan yang pertama; sebaliknya, gempa pembuka berkekuatan lebih kecil, 5,9 SR, terjadi pada 14 Januari pukul 14:45. Tanah berguncang berulang kali setelah gempa utama berkekuatan 6,2 skala Richter.

Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan studi kasus di Kabupaten Mamuju guna menganalisis upaya Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam

Gempa dan upaya pemulihan ekonomi. Dalam konteks ini, pemulihan ekonomi mencakup langkah-langkah untuk membangun kembali sektor-sektor ekonomi yang terdampak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pembangunan Resiliensi Masyarakat pada rehabilitasi pasca gempa akan menitik beratkan pada perencanaan dan desain tahap gempa, peningkatan infrastruktur yang tahan gempa, pendidikan kesadaran dan pendidikan masyarakat, pengembangan sistem peningkatan dini, dan pembangunan pemukiman yang aman.

Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menangani bencana gempa di Kabupaten Mamuju. Sehingga penulis dapat mengetahui proses kinerja dari pemerintah Kabupaten Mamuju terkait bencana gempa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menghadirkan rumusan masalah. Bagaimana kondisi Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa di Kabupaten Mamuju pasca gempa bumi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa di Kabupaten Mamuju pasca gempa bumi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi, mendukung serta melihat apa saja yang menjadi hambatan Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju.

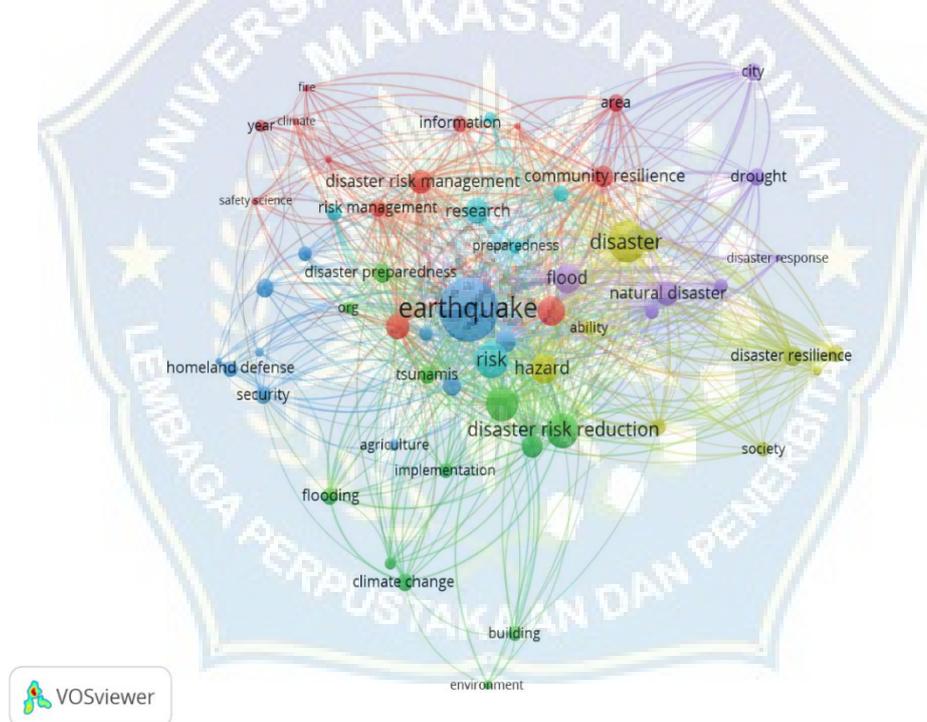
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan mengemukakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat yang dianggap memiliki kesamaan dengan judul atau topik yang penulis teliti terkait dengan Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju.

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu Menggunakan Aplikasi Vosviewer



Sumber: Diolah Oleh Vosviewer, 2024.

Pada gambar di atas menjelaskan tentang hubungan (*networking*) antar tema dalam literatur. Nampak pada visualisasi itu bahwa tema *disaster* lebih dominan dari tema-tema lainnya yang saling berkaitan misalnya, tata kelola risiko bencana, Resiliensi Masyarakat, dan gempa bumi. Hal ini menunjukkan bahwa

Pada gambar di atas nampak konsep *disaster* masih relevan untuk diteliti dan populer pada tahun 2020-2023. Hal itu juga berkaitan dengan konsep konsep lainnya yang lebih baru misalnya, *disaster risk management*, *community resilience*, *earthquakes*.

Berdasarkan visualisasi *vosviewer* pada gambar 2.1 dari hasil olah data menggunakan kata kunci “Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa,” dikelompokkan menjadi 6 kluster pada *software vosviewer*, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1. Pembagian menjadi enam kluster ini mencerminkan adanya beragam dimensi atau sub-tema yang terkait dengan Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa. Setiap kluster dapat mewakili fokus penelitian atau konsep tertentu yang memiliki keterkaitan erat dengan kata kunci tersebut. Visualisasi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur dan keterkaitan antar konsep atau topik dalam literatur yang membahas Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa. Dengan demikian, hasil analisis *VOSviewer* ini dapat menjadi landasan untuk lebih memahami ragam aspek dan nuansa dalam konteks Resiliensi masyarakat setelah terjadi gempa. Analisis lebih lanjut pada masing masing kluster dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tren, temuan utama, dan dinamika penelitian yang ada dalam literatur yang terkait.

Tabel 2.3 Klaster Risiko Bencana, Resiliensi Masyarakat

Klaster 1 Merah (11)	Resiliensi, kesiapsiagaan bencana, manajemen risiko, manajemen risiko bencana, Resiliensi masyarakat, kawasan, kebijakan, ilmu keselamatan, tahun, manajemen perkotaan, informasi.
Klaster 2 Hijau (9)	Pengurangan risiko bencana, manajemen, implementasi, banjir, perubahan iklim, bangunan, lingkungan, kesiapsiagaan bencana, isu.
Klaster 3 Biru (9)	Gempa bumi, manajemen, penelitian, pertanian, keamanan, pertahanan tanah air, tsunami sosial internasional, penelitian risiko, tsunami.
Klaster 4 (9) Kuning	Bencana, bahaya, Resiliensi bencana, masyarakat, dampak, lingkungan binaan, kemampuan, pengurangan bencana, studi.
Klaster 5 (6) Ungu	Bencana alam, kekeringan, tanggap bencana, kota, bencana alam, tanah longsor.
Klaster 6 (5) Biru	Risiko, penelitian, ilmu sosial kerentanan, kesiapan, krisis.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan *publish or perish* ditemukan 200 artikel jurnal dengan rentan waktu 2020-2023 yang dimana berkaitan erat dengan kata kunci *Disaster Risk Management, Community Resilience, Earthquakes* Artikel-artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan *VOSviewer* untuk menentukan posisi lokasi penelitian dari peneliti.

Dari hasil olah data *Vosviewer* ditemukan 3 poin utama yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu, diantaranya penelitian tentang disaster risk management. Lebih lanjut, terdapat penelitian yang membahas tentang analisis kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Dalam visualisasi *VOSviewer* tidak terdapat penelitian yang membahas tentang Tata kelola Risiko Bencana, tetapi terlebih lagi bisa dilihat dari lokasi

yang telah melakukan penelitian mengenai Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Tata Kelola Risiko Bencana dalam upaya menghadapi gempa bumi. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang direncanakan yaitu lebih spesifik pada masyarakat pesisir di Kabupaten Mamuju, pada penelitian terdahulu membahas tentang manajemen risiko bencana tsunami namun belum ditemukan penelitian yang membahas tentang tata kelola risiko bencana gempa bumi di kabupaten mamuju tengah, oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilakukan agar kita bisa mengaplikasikan tata kelola risiko bencana gempa bumi.

B. Konsep dan Teori

1. Bencana Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Ashari, M. 2024).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membagi bencana dalam tiga jenis (Pinasti, S. A. 2024) yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas maka sifat dasar bencana adalah meninggalkan keadaan yang merusak dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Sedangkan fungsi dari adanya jenis-jenis bencana, seperti bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial adalah untuk menjelaskan bentuk dari sumber bencana itu sendiri, sehingga dengan diketahui bentuk suatu jenis bencana maka diketahui risiko yang akan ditimpa masyarakat setelah terjadinya bencana itu sendiri (Rahmawati, I. 2022).

Selain itu pemberian batasan dan pengertian terhadap bentuk-bentuk bencana alam juga akan dapat memberikan masukan tentang apakah dengan adanya terjadi suatu bencana maka ada pihak-pihak tertentu yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Pada bencana alam, maka kondisi yang menyebabkan terjadinya bencana adalah alam. Pada keadaan ini maka alam tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Tetapi kondisi yang berhubungan dengan suatu pertanggungjawaban hukum dengan terjadinya

bencana alam dapat ditelusuri dengan melihat hal yang menyebabkan terjadinya bencana alam itu sendiri (Devi, S. 2021).

Misalnya bencana alam berupa banjir atau tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa, maka kondisi bencana alam seperti ini dapat dihubungkan dengan kegiatan penggundulan hutan. Objek pelaku penggundulan hutan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum dengan terjadinya bencana alam banjir atau tanah longsor tersebut. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti bencana alam tsunami, angin puting beliung, maka dalam hal ini tidak ada pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena penyebabnya adalah alam (Devi, S. 2021).

2. Tata Kelola Bencana Alam

Tata kelola bencana alam merujuk pada proses, kebijakan, dan struktur yang digunakan untuk mengelola risiko bencana alam dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Tata kelola ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

a. Tata Kelola Risiko Bencana

Tata kelola risiko bencana adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Paripurno 2014). Berikut ringkasan konsep tata kelola risiko bencana:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam tata kelola risiko bencana. Ini melibatkan pengidentifikasian potensi bencana dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.

2) Evaluasi Risiko

Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah evaluasi risiko. Ini melibatkan penilaian terhadap probabilitas terjadinya bencana dan dampak yang mungkin terjadi.

3) Pengurangan Risiko

Setelah risiko dievaluasi, tindakan pengurangan risiko harus diambil. Ini termasuk dalam pengembangan strategi dan rencana untuk mengurangi risiko, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, perencanaan tata ruang yang aman, dan edukasi masyarakat.

4) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko melibatkan tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak bencana jika bencana tersebut terjadi. Contoh tindakan mitigasi meliputi pendidikan masyarakat tentang tindakan darurat, pembangunan bendungan untuk mengontrol banjir, dan pemantauan gempa bumi.

5) Keterlibatan Masyarakat

Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses tata kelola risiko bencana. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi bencana dan menjadi bagian dari solusi.

6) Rencana Darurat

Rencana darurat adalah bagian penting dari tata kelola risiko bencana. Ini adalah panduan yang harus diikuti oleh pihak berwenang dan masyarakat saat bencana terjadi. Rencana ini mencakup langkah-langkah evakuasi, komunikasi darurat, dan koordinasi tanggap darurat.

7) Pengawasan dan Evaluasi

Proses tata kelola risiko bencana harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa strategi dan rencana yang ada efektif. Perubahan dapat dibuat jika diperlukan untuk meningkatkan kesiapan dan respon terhadap bencana.

b. Karakteristik tata kelola risiko bencana

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB), menegaskan yang dimaksud dengan ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Selanjutnya mengelompokkan bencana ke dalam bencana alam, bencana non alami, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam

antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang mengakibatkan peristiwa atau serangkaian yang disebabkan manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar masyarakat, dan teror.

Berdasarkan *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction*, potensi bencana atau bahaya ini dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:

- 1) Bahaya beraspek geologi, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung api, gerakan tanah (*mass movement*) sering dikenal dengan tanah longsor.
- 2) Bahaya beraspek hidrometeorologi, antara lain: banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang.
- 3) Bahaya beraspek biologi, antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman dan hewan/ ternak.
- 4) Bahaya beraspek teknologi, antara lain: kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kegagalan teknologi.
- 5) Bahaya beraspek lingkungan, antara lain: kebakaran hutan kerusakan lingkungan, pencemaran limbah.

Departemen Pekerjaan Umum 1987, dalam Penyusunan Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang, mengelompokan

bencana berdasarkan penyebabnya, menjadi tiga jenis yaitu, bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi.

1) Bencana alam (*natural disaster*)

Bencana alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologis, biologis, seisme, hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam yang mengancam kehidupan struktur dan perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang termasuk bencana alam antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman, gempa bumi, letusan gunung merapi, tanah longsor, gelombang laut pasang, banjir, erosi, angin topan, badai tropis, kekeringan dan kebakaran hutan.

2) Bencana akibat ulah manusia (*man-made disaster*)

Bencana karena ulah manusia merupakan peristiwa yang terjadi karena proses teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antara manusia itu sendiri yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Bencana yang termasuk akibat ulah manusia antara lain: bencana akibat perang, peristiwa kerusuhan/konflik penduduk, kebakaran, ledakan industri/instalasi listrik, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan.

3) Bencana kombinasi

Bencana ini dapat disebabkan oleh ulah manusia maupun oleh alam itu sendiri. Bencana ini dapat disebabkan oleh keadaan geologis, biologis, seisme, hidrologi, atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan maupun teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungan serta interaksi antara manusia itu sendiri. Contoh dari bencana yang mungkin timbul dari kombinasi ini adalah banjir, kebakaran hutan, longsor, erosi dan abrasi.

c. Risiko Bencana

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada periode tahun 2000-2010 terjadi bencana tanah longsor

dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilitasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 250 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang

merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional.

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Terdapat banyak konsep perhitungan tingkat risiko bencana.

d. Pengelolaan Risiko Bencana

Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia, mengakibatkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang cukup besar. Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan risiko bencana yang ada di negara Indonesia masih sangat jauh dari yang diharapkan. Pengelolaan risiko bencana harus dimengerti oleh semua kalangan masyarakat terutama masyarakat yang menempati daerah rawan bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan Masyarakat.

Definisi Risiko menurut ISO/IEC dalam Sunarto (2014) dijelaskan bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi probabilitas suatu kejadian dengan konsekuensinya atau dengan akibatnya. Potensi kejadian dapat berupa keuntungan (*upside risk*) atau bahaya terhadap keberhasilan (*downside risk*). Risiko dapat juga didefinisikan sebagai *pure risk* dan *speculative risk*. Risiko murni (*pure risk*) adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang jika terjadi pasti menyebabkan kerugian, sedangkan risiko spekulasi juga merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu, tetapi jika terjadi akibatnya mungkin rugi tapi mungkin juga untung.

risiko bencana adalah interaksi antara kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Besarnya risiko bencana dapat dinyatakan dalam besarnya kerugian yang terjadi untuk suatu besaran kejadian tertentu. Risiko bencana pada suatu daerah tergantung pada beberapa faktor yaitu alam (geografi/geologi), kerentanan masyarakat terhadap fenomena (kondisi dan banyaknya bangunan), konteks strategis daerah, kesiapan masyarakat setempat untuk tanggap darurat dan membangun kembali.

Menurut Agus Rahmat (2006) dalam buku Hadi Purnomo (2010) Manajemen Risiko Bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat bencana, dan sesudah terjadi bencana. Pengelolaan risiko bencana yang dikenal sebagai siklus pengelolaan risiko bencana bertujuan antara lain:

- 1) Mencegah kehilangan jiwa seseorang.
- 2) Mengurangi penderitaan manusia.
- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat dan juga kepada pihak yang berwenang mengenai risiko bencana.

Pengelolaan risiko bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (*aplikatif*) yang mencari, dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*), terkait dengan pencegahan (*preventif*), pengurangan (*mitigasi*), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Pengelolaan dalam bantuan bencana merupakan hal-hal yang penting bagi pengelolaan puncak yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*) dan pengendalian (*controlling*).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diuraikan bahwa tujuan dari pengelolaan risiko bencana di antaranya:

- 1) Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan atau masyarakat dan negara.
- 2) Mengurangi penderitaan korban bencana.
- 3) Mempercepat pemulihan.

- 4) Memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

manajemen risiko adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang dilakukan dalam kegiatan bisnis atau proyek yang dapat dipergunakan untuk mengatasi atau mengatur risiko. Kerangka kerja proses pengelolaan risiko memiliki beberapa tahapan mulai dari identifikasi risiko, klasifikasi risiko, analisis risiko, tindakan mitigasi dan pengelolaan risiko.

Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan sistematis dari kebijaksanaan pengelolaan, prosedur, dan pelatihan meliputi: memastikan hal-hal yang terkait bencana, mengidentifikasi risiko bencana yang akan ditimbulkan, menganalisis risiko bencana, mengevaluasi risiko bencana dan mengatasi risiko bencana tersebut. Pengamatan dan penelitian yang berkesinambungan akan mempermudah dalam pengelolaan risiko bencana.

3. Resiliensi Masyarakat

Daya tahan/berdaya tahan (*resilience/resilient*) adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya

untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan Upaya upaya pengurangan risiko bencana.

Resiliensi umumnya dilihat sebagai konsep yang lebih luas dari pada kapasitas karena melampaui perilaku, strategi dan tindakan khusus untuk pengurangan risiko dan manajemen yang biasanya dipahami sebagai kapasitas. namun, sulit untuk memisahkan konsep dengan jelas. Dalam penggunaan sehari-hari, kapasitas dan kapasitas penanganan sering kali berarti sama dengan Resiliensi.

Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mencakup kegiatan (wignyo adiyoso 2015):

a. Resiliensi masyarakat terhadap Bencana

Resiliensi adalah kemampuan setiap individu dan masyarakat dalam menghadapi setiap bencana sehingga bencana tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi setiap individu agar setiap individu lebih siap menghadapi bencana tersebut apabila terjadi lagi. Resiliensi masyarakat tidak hanya mengenai bagaimana cara untuk menghadapi terjadinya suatu bencana dan mengatasi kerentanan agar masyarakat tetap dapat bertahan di lingkungan yang terkena bencana. Resiliensi berkaitan dengan adaptasi yang dilakukan dan persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana.

ketahanan masyarakat terhadap bencana sebagai kemampuan suatu komunitas untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak bencana. Ketahanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan sebelum bencana, respons saat bencana terjadi, hingga pemulihan pasca bencana. Ada beberapa elemen utama yang berkontribusi terhadap ketahanan masyarakat terhadap bencana yaitu:

- 1) Kesiapan: Ini mencakup segala upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi, seperti pendidikan dan pelatihan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta sistem peringatan dini.
- 2) Respons: Tindakan yang dilakukan selama bencana terjadi, seperti evakuasi, penanganan korban, dan koordinasi antar lembaga.
- 3) Pemulihan: Proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, termasuk pemulihan ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

b. Resiliensi Pangan

Resiliensi pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat.

kondisi di mana semua individu dalam suatu komunitas memiliki akses yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas, terhadap pangan yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Ketahanan pangan terdiri dari tiga pilar utama yaitu:

- 1) Ketersediaan Pangan: Kemampuan untuk memastikan bahwa pangan yang cukup tersedia secara berkelanjutan, baik melalui produksi lokal maupun impor.
- 2) Akses Pangan: Kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup melalui produksi sendiri, pembelian, atau bantuan pangan.
- 3) Pemanfaatan Pangan: Penggunaan pangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan gizi individu, yang melibatkan aspek sanitasi, kesehatan, dan pengetahuan tentang gizi.

c. Resiliensi Ekonomi

Resiliensi Ekonomi dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghadapi genangan rob sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat. Resiliensi ekonomi terdiri dari jenis pekerjaan masyarakat, pendapatan masyarakat, jumlah tabungan untuk perbaikan rumah dan bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat. Jenis pekerjaan masyarakat yang rentan berhubungan dengan jumlah pendapatan masyarakat yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk melakukan perbaikan kerusakan kerusakan bangunan rumah akibat rob. Pendapatan Masyarakat yang rentan menyebabkan hanya beberapa masyarakat yang mampu menyisihkan kurang dari 10% pendapatannya untuk ditabung untuk biaya perbaikan rumah dan lingkungan yang rusak. Untuk dapat mencapai Resiliensi ekonomi, masyarakat harus memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Masyarakat yang memiliki pekerjaan sampingan dengan membuka warung di depan rumah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun pendapatan yang di dapat dari pekerjaan sampingan tidak sebanyak pendapatan dari pekerjaan utama.

Ketahanan ekonomi adalah kemampuan suatu komunitas untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi meskipun menghadapi tekanan eksternal, termasuk bencana alam. ketahanan ekonomi mencakup yaitu:

- 1) Diversifikasi Ekonomi: Memiliki berbagai sumber pendapatan dan kegiatan ekonomi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor.
 - 2) Tabungan dan Aset: Memiliki cadangan keuangan dan aset yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi darurat.
 - 3) Akses ke Pasar dan Modal: Kemampuan untuk menjual produk dan jasa serta mendapatkan akses ke modal untuk berinvestasi dan memulihkan kondisi ekonomi setelah bencana.
- d. Resiliensi Sosial dan Kesehatan

Resiliensi Sosial berupa adanya organisasi yang peduli terhadap lingkungan dan permasalahan yang terjadi di permukiman serta akses pendidikan dan kesehatan. Organisasi sosial yang peduli terhadap lingkungan di Kelurahan Bandarharjo adalah paguyuban. Paguyuban adalah perkumpulan bapak-bapak yang membahas tentang kerja bakti, kebersihan, keamanan lingkungan dan lain-lain tetapi tidak pernah

membahas tentang bagaimana menangani permasalahan rob karena bagi masyarakat rob akan selalu terjadi sehingga usaha yang dilakukan hanya dapat menangani rob dalam waktu sementara. Akses terhadap fasilitas kesehatan adalah puskesmas dan klinik.

Ketahanan sosial merujuk pada kemampuan komunitas untuk tetap bersatu, saling mendukung, dan mempertahankan kohesi sosial meskipun menghadapi tekanan bencana. ketahanan sosial meliputi yaitu:

- 1) Jaringan Sosial: Hubungan yang kuat antara individu dalam komunitas yang memungkinkan adanya bantuan dan dukungan timbal balik.
- 2) Partisipasi Komunitas: Tingkat keterlibatan individu dalam kegiatan komunitas dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan bersama.
- 3) Kepercayaan dan Solidaritas: Tingkat kepercayaan dan solidaritas antar anggota komunitas yang memperkuat kohesi sosial dan memudahkan koordinasi dalam situasi darurat.
- 4) Akses ke Layanan Kesehatan: Ketersediaan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh anggota komunitas, baik dalam situasi normal maupun darurat.
- 5) Sistem Kesehatan yang Kuat: Infrastruktur kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan yang terlatih, serta persediaan obat dan peralatan medis yang cukup.

- 6) Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan: Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan cara-cara menjaga kesehatan serta tindakan yang harus diambil saat bencana terjadi.

Twigg (2007) menerangkan bahwa *Resilience (Resiliensi)* mencakup tiga pengertian, yaitu:

- a. Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan atau adaptasi.
- b. Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur struktur dasar tertentu, selama kejadian kejadian yang mendatangkan bahaya.
- c. Kapasitas untuk memulihkan diri atau melenting balik setelah suatu kejadian.

Kebijakan adaptasi iklim mengacu pada tindakan diambil oleh pemerintah termasuk peraturan perundangan, peraturan dan insentif untuk mandat atau memfasilitasi perubahan dalam sistem sosio ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, termasuk iklim yang bermacam macam dan ekstrem. Perubahan bisa dilakukan dengan praktek, proses, atau struktur sistem untuk diproyeksikan atau perubahan aktual dalam iklim.

Mengingat dampak signifikan bencana alam, penting untuk menentukan tingkat risiko bencana di suatu negara daerah. Pemahaman mendalam tentang masalah ini akan membantu pemerintah untuk mengembangkan kerangka kerja atau kebijakan yang komprehensif meminimalkan dampak

negatif dari bencana. Selain itu, pemahaman akan tingkat risiko juga harus ditindaklanjuti dengan penilaian tingkat Resiliensi untuk mengatasi bencana.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Berbagai macam dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir kerugiannya melalui upaya kesiapsiagaan, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya bencana antara lain (Nurjanah, 2012):

- a. Faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
- b. Faktor non-alam (*non-natural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat pembuatan manusia, dan
- c. Fenomena sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada

prinsip: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, keseimbangan dan keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, *non-diskriminasi*, dan *non-proselytising*.

Tahapan Manajemen Bencana menurut Ramli, 2010 sebagai berikut:

a. Pra Bencana

Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum terjadinya bencana atau pra bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

1) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

2) Peringatan dini

Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai. Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang potensi terkena bencana yang akan kemungkinan datangnya suatu bencana di daerahnya masing-

masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datang suatu bencana. Dewasa ini sistem peringatan dini sudah berkembang pesat didukung oleh berbagai temuan teknologi. Di Indonesia, berbagai ramalan atau perkiraan akan datangnya bencana sudah banyak dilakukan seperti cuaca, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Pemerintah telah memasang berbagai peralatan peringatan dini di berbagai kawasan di Indonesia.

3) Mitigasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

a) Pendekatan teknis/struktural

Mitigasi struktural adalah bentuk mitigasi yang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam mengurangi dampak negatif banjir. Mitigasi secara

struktural ini dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan terhadap fasilitas umum dan hunian penduduk.

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya membuat rancangan atau desain yang kokoh dari membangun sehingga tahan terhadap gempa, membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material tahan api, dan membuat rancangan teknis pengaman, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.

b) Pendekatan manusia

Pendekatan secara manusia ditunjukkan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

c) Pendekatan administrative

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya di tahap mitigasi sebagai penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana, sistem perizinan dengan memasukkan aspek analisis risiko bencana, penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri berisiko tinggi, mengembangkan program pembinaan dan

pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan, dan menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi.

d) Pendekatan kultural

Masih ada anggapan dikalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berfikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana dan sekaligus mengurangi keparahannya.

b. Saat terjadi bencana

Langkah-langkah yang digunakan dalam keadaan tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan.

1) Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana (*reponse*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

2) Penanggulangan Bencana

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian.

c. Pasca Bencana

1) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

2) Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan, pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun

dan menguraikan dan menjelaskan hubungan hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka kerja adalah representasi konseptual tentang bagaimana sebuah teori terhubung dengan elemen lain yang telah diakui sebagai kesulitan yang signifikan. Kerangka kerja yang kuat secara konseptual akan menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka pikir peneliti, sedangkan kerangka teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis. kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan hubungan yang terjadi. kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variable variabel yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan.

Tabel 2.4 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Dalam hal ini peneliti ini ingin mengetahui bagaimana elemen sukses Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian guna memudahkan proses analisa data yang diperoleh, yang akan memperjelas pembahasan utama dari suatu hasil penelitian maka ditentukanlah fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketekunan (*Perseverance*)

Resiliensi masyarakat diukur dari kemampuan mereka untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko bencana, serta untuk mengatasi dampak bencana dengan sumber daya yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi Resiliensi masyarakat dapat meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

2. Mencari Bantuan Adaptif (*Seek Adaptive Help*)

Resiliensi pangan diukur dari beberapa aspek, termasuk ketersediaan pangan, aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan, kualitas pangan, serta keberlanjutan sistem pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Resiliensi pangan meliputi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, serta kebijakan pangan dan gizi.

3. Pengaruh Negatif dan Respon Emosional (*Negative Affect and Emotional Responses*)

Resiliensi ekonomi diukur dari beberapa aspek, termasuk kestabilan pendapatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap layanan keuangan, serta kemampuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Resiliensi ekonomi meliputi aspek pekerjaan, usaha mikro dan kecil, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan ekonomi.

4. Resiliensi Sosial dan Kesehatan

Resiliensi sosial dan kesehatan diukur dari beberapa aspek, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, keamanan pangan,

jaringan sosial dan dukungan sosial, serta keberlanjutan budaya dan identitas sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi Resiliensi sosial dan kesehatan meliputi aspek pendidikan, kebudayaan, kondisi lingkungan, dan akses terhadap informasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1) Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu dalam penelitian. Adapun waktu penelitian yang akan ditempuh yaitu 2 bulan mulai 29 Januari 2024 hingga 29 Februari 2024.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene tepat di Jend. No. 107, Jl. Jend. Ahmad Yani, Totoli, Kec. Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju tepat di 8WF3+G6C, Mamunyu, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511 dan alasan penelitian karena ingin mengetahui tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sedangkan tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan acuan pada pengukuran indeks terhadap Resiliensi masyarakat pasca bencana gempa. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif yakni untuk memberikan gambaran berdasarkan fenomena dan kenyataan yang terjadi, menganalisis, mengobservasi serta mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Resiliensi masyarakat pasca bencana gempa di Kabupaten Mamuju.

C. Sumber Data

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data yang dianggap primer berasal dari sumber asli atau utama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Informasi ini harus diperoleh melalui sumber, juga dikenal sebagai responden, yaitu individu yang kami libatkan untuk tujuan penelitian atau sebagai cara mengumpulkan data.

2. Data Sekunder

Data yang tidak segera memasok data ke pengumpul data disebut sebagai data sekunder. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data utama, yang meliputi buku-buku dan bacaan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini ditentukan secara purposive sampling yaitu dipilih secara sengaja yang dianggap memahami dan mengetahui data, informasi dan fakta untuk dilakukan wawancara, baik dari pihak Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial maupun dari Masyarakat sesuai dengan lokasi penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	NURAIDAH, SPD. MM	ND	Sekretaris BPBD Kabupaten Mamuju
2	HADINDA. SE	HD	Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Mamuju
3.	EDI KURNIAWAN	EK	LSM Kabupaten Mamuju
4.	BAPAK SYUAIB	SA	Tokoh Masyarakat
5.	IBU MURTINI	MR	Korban bencana Gempa Kabupaten Mamuju

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang detail dapat dikumpulkan dalam waktu yang relatif lama berkat metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Karena memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian, prosedur pengumpulan data adalah tahapan yang paling penting dalam proses. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan Tata Kelola Risiko Bencana Dalam Resiliensi Masyarakat Pasca Gempa Di Kabupaten Mamuju (Studi Tata Kelola Bencana Pasca Gempa).

2. Wawancara

Menggunakan informan penelitian yang dipilih sebagai sampel dan diyakini mampu memberikan informasi, pendekatan ini dilakukan melalui pertemuan langsung untuk bertukar informasi atau gagasan melalui sesi tanya jawab secara lisan dan mendalam yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang dan sebagai bentuk lampiran proses pengambilan data maupun untuk menginput data.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap data verbal yang terkumpul di lapangan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data sesuai dengan langkah-langkah prosedur berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih data mana yang akan diperhatikan dan dipusatkan baik pada data yang sekedar pelengkap maupun data yang benar-benar dibutuhkan sebagai data primer. Dalam uraian atau laporan yang menyeluruh dan mendalam, disajikan data-data yang dikumpulkan dari lokasi studi atau data lapangan. Laporan lapangan diringkas, diringkas, dan poin utamanya dipilih dan dikonsentrasikan.

2. Penyajian Data

Semua masalah kajian disajikan dengan data yang telah dikumpulkan dari lapangan, dipilah antara yang perlu dan yang tidak, kemudian dikategorikan, dan terakhir diberi batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Data kemudian dapat disajikan, dan kesimpulan awal dapat dibuat. Sepanjang penyelidikan, kesimpulan ini juga tercapai. Para peneliti telah berusaha untuk memeriksa dan memperoleh signifikansi dari apa yang telah ditentukan sejak awal lapangan serta selama proses pengumpulan data.

G. Keabsahan Data

Pada titik ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi, yang digambarkan sebagai memverifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai periode untuk menilai kepercayaannya. Macam Macam teknik triangulasi, menurut Sugiyono (sinatra:2019) dalam (Fitriani, 2013):

1. Triangulasi Sumber Data

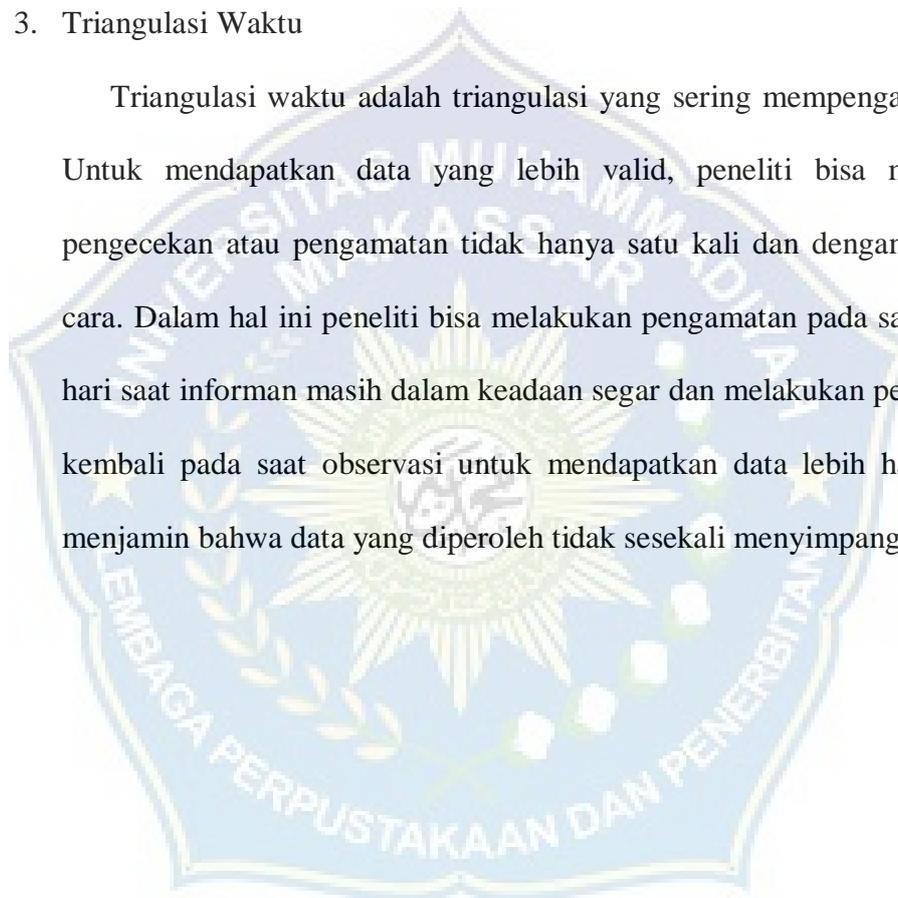
Triangulasi sumber adalah jenis triangulasi yang memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari banyak sumber untuk memverifikasinya. Dalam situasi ini, peneliti dapat membandingkan temuan observasi dan wawancara dengan dokumen yang sudah ada atau temuan wawancara informan (data primer) dengan membaca literatur terkait penelitian (data sekunder).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, metode observasi atau dokumentasi digunakan untuk memverifikasi data yang diterima dengan metodologi wawancara.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan data yang lebih valid, peneliti bisa melakukan pengecekan atau pengamatan tidak hanya satu kali dan dengan berbagai cara. Dalam hal ini peneliti bisa melakukan pengamatan pada saat di pagi hari saat informan masih dalam keadaan segar dan melakukan pengamatan kembali pada saat observasi untuk mendapatkan data lebih handal dan menjamin bahwa data yang diperoleh tidak sesekali menyimpang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan pengumpulan data, disediakan deskripsi temuan-temuan penelitian dan pembahasan data-data yang berkaitan dengan topik kajian. Peneliti terlebih dahulu akan memberikan pengenalan umum secara singkat tentang Kabupaten Mamuju sebelum menguraikan temuan penelitian dan kesimpulan dari pembahasan.

1. Profil Umum Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju adalah sebuah kabupaten dan juga merupakan ibu kota dari provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Suku asli wilayah ini adalah Suku Mandar yang tersebar di pesisir Sulawesi Barat. Wilayah pedalaman Kabupaten Mamuju dihuni oleh Suku Kalumpang yang wilayahnya terdapat salah satu situs neolitik tertua di Indonesia, dan merupakan peninggalan Orang Austronesia yang disebut sebagai nenek moyang Bangsa Indonesia.

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah Barat Pulau Sulawesi tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi koordinat 2o8'13"-2o 56'41" Lintang Selatan dan 117o 8'10"- 119o 51'33" Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 4,954,57 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) kilometer persegi. Secara administrasi, Kabupaten Mamuju berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Mamuju dengan wilayah yang terdiri dari wilayah pesisir dan laut, daratan, dan pegunungan dan merupakan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas wilayah 4.954,57 km², secara administrasi pemerintahan terbagi atas 11 kecamatan, terdiri dari 88 Desa, dan 13 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang dengan luas wilayah 1.792,55 Km² atau 36,18 persen, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Balabalakang dengan luas wilayah 1,47 Km² atau 0,03 persen, dan untuk ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Mamuju dengan luas 246,22 Km².

Berdasarkan jarak terhadap ibukota kabupaten maka Kecamatan Balabalakang memiliki jarak terjauh sekitar 188,62 km, sedangkan yang terdekat adalah Kecamatan Mamuju yang juga merupakan ibukota kabupaten. Kecamatan Balabalakang juga merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Mamuju yang tidak bisa diakses menggunakan angkutan darat.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Makassar								
	Jumlah			Perempuan			Laki Laki		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tapalang	20 772	21 157	21 527	10 346	10 547	-	10 426	10 610	-
Tapalang Barat	10 371	10 543	10 710	5 189	5 281	-	5 182	5 262	-
Mamuju	70 309	72 579	74 866	34 828	35 988	-	35 481	36 591	-
Simboro	29 142	30 035	30 926	14 398	14 855	-	14 744	15 180	-
Kepulauan Bala Balakang	2 705	2 755	2 802	1 266	1 291	-	1 439	1 464	-
Kaluku	60 215	61 822	63 427	29 699	30 523	-	30 516	31 299	-
Papalang	24 379	24 795	25 198	12 021	12 240	-	12 358	12 555	-
Sampaga	15 865	16 100	16 324	7 859	7 985	-	8 006	8 115	-
Tommo	23 895	14 590	25 281	11 310	11 651	-	12 585	12 939	-
Kalumpang	12 024	12 175	12 319	5 798	5 877	-	6 226	6 298	-
Bonehau	9 716	9 838	9 946	4 610	4 672	-	5 106	5 166	-
Kabupaten Mamuju	279	286	293	137	140	-	142 069	145 479	-
	2393	389	326	324	910				

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2024.

Tabel 4.4: luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mamuju Tahun 2024.

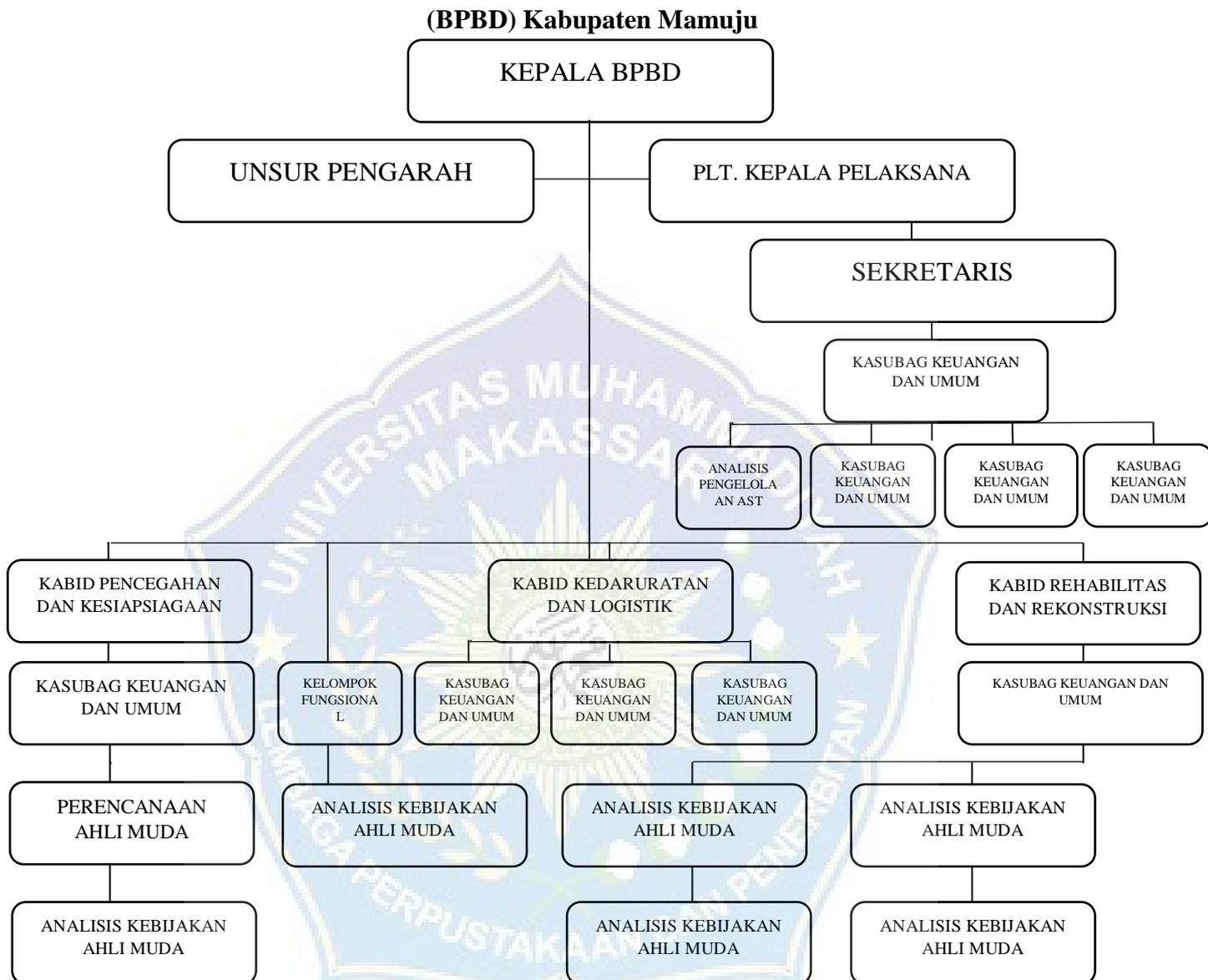
Kecamatan	Luas Wilayah Per Kecamatan (km ²)		
	2022	2023	2024
Tapalang	271,63	273,02	273,02
Tapalang Barat	111,06	111,63	111,63
Mamuju	246,22	247,48	247,48
Simboro	132,06	132,73	132,73
Kepulauan Bala	1,47	1,48	1,48
Balakang			
Kalukku	452,65	454,96	454,96
Papalang	200,89	201,92	201,92
Sampaga	110,27	110,83	110,83
Tommo	765,75	769,66	769,66
Kalumpang	1 792,55	1 801,71	1 801,71
Bonehau	870,02	874,47	874,47
Kabupaten Mamuju	4 954,57	4 979,89	4 979,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tahun 2024.

c. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Mamuju dan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

Tabel 4.5 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

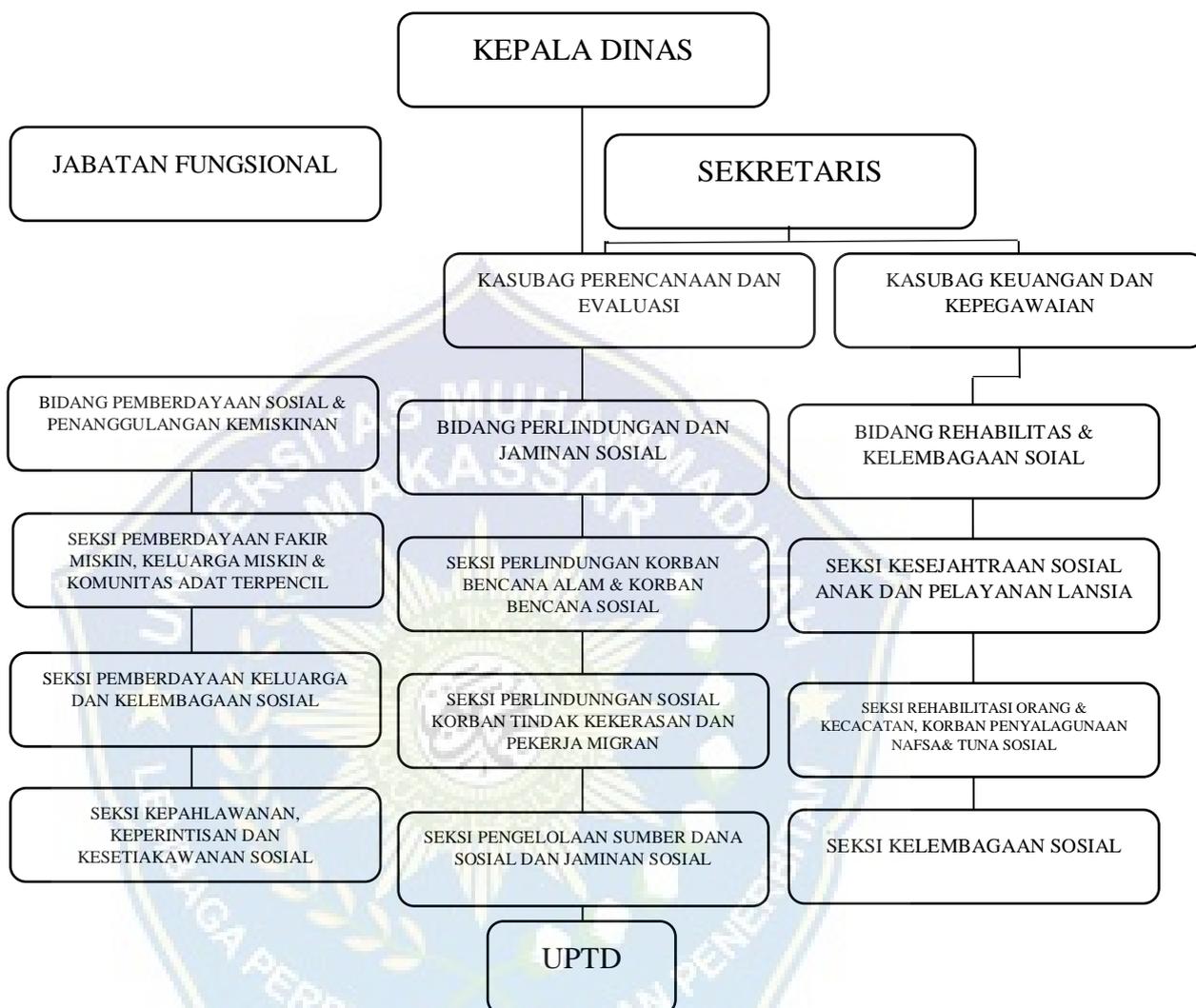


Tabel 4.6 Nama dan Jabatan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju

NO	NAMA	JABATAN
1	MUH. TASLIM SUKIRNO. SE., MM	PLT. KEPALA PELAKSANA
2	MUH. TASLIM SUKIRNO. SE., MM	SEKRETARIS
3	MULIATI. SE	KASUBAG KEUANGAN DAN UMUM
4	Hj. SUKRIYANTY, SE	
5	SALMIAH, S.IP	
6	SITTI NAIMAH	
7	MUH. RADI. S.IP	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
8	FAISAL. D. S.IP	KASUBAG KEUANGAN DAN UMUM
9	RIA SORAYA, S.Sos	KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK
10	MUH. RUSLI. S.IP	KASUBAG KEUANGAN DAN UMUM
11	ABDUL WAHAB	
12	HASRSALI	
13	ASJUM SOVIA. S.KOM	KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
14	FAISAL. D. S.IP	KASUBAG KEUANGAN DAN UMUM
15	NURAIDAH. S.Pd., MM	PERENCANAAN AHLI MUDA
16	ANDI AHRIANA ACHYAR, SH	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
17	BURHANUDDIN. S.IP	
18	BUDI SUTIYONO. S.IP	
19	MUHLIS ZAINAL. SE	
20	SYAMSIAR. SE	
21	SUGIRAH MUHIDDIN. SE	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Mamuju.

Tabel 4.7 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju**Tabel 4.8 Nama dan Jabatan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju**

NO	NAMA	JABATAN
1	IKHSAN LASAMI. ST.MM	KEPALA DINAS
2	IWANUDDIN PATMA, SP	SEKRETARIS
3	MUH. SYAWALUDDIN S, S.IP	KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI
4	NI NYOMAN SARI ASTIANI, SE	KASUBAG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
5	IHWANUDDIN, SE, M.Si	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL & PENANGGULANGAN KEMISKINAN

6	IRAYANTI, S.IP	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
7	DEWI MAYA SARI F.S.Sos	BIDANG REHABILITASI & KELEMBAGAAN SOSIAL
8	AKBAR SAFITRA, SKM	SEKSI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KELUARGA MISKIN & KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
9	HERMAN, SE	SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KELEMBAGAAN SOSIAL
10	REKY SANDY BASTARY, SE. M.Si	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
11	M. ASWAN AZIS, S.Sos	SEKSI PERLINDUNGAN KORBAN BENCANA ALAM & KORBAN BENCANA SOSIAL
12	BAMBANG SURYANTO	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
13	NIRWANA NANCU, SE	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
14	CAHYADI IDRUS, SE	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN PELAYANAN LANSIA
15	Hj. MARDAWATI, Bsw	SEKSI REHABILITASI ORANG & KECACATAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN NAFSA& TUNA SOSIAL
16	JUSMAWIAH, SE	SEKSI KELEMBAGAAN SOSIAL

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2024

d. Visi dan Misi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Mamuju

Gerakan membangun menuju mamuju menjadi Masyarakat maju dan mandiri (Gerbang Maju) adalah visi RPJMD 2005-2025 Kabupaten

Mamuju, dijabarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mamuju dalam RPJMD 2021-2024 yaitu:

1. Visi

Mamuju Keren “Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman”.

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi BPBD Kabupaten Mamuju tersebut akan ditempuh melalui 5 (Lima) Misi pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, yaitu:

- a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik yang berkelanjutan.
- c) Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan sosial.
- d) Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan agama, budaya serta kearifan lokal.
- e) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi potensi lokal.

2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju mengemban tugas pokok sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

- 1) Melakukan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggara penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) Mempertanggung jawabkan pengguna anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta rekonstruksi akibat bencana alam;
- 4) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional menyusun, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
- 5) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

- 9) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas;

Pembangunan bidang penanggulangan bencana pada hakekatnya adalah Pembangunan manusia seutuhnya di bidang kesadaran kebencanaan, yang fokus sarannya diarahkan kepada Pembangunan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana yang sebaik baiknya, serta penciptaan Masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap ancaman bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya.

Sasaran pelayanan Pembangunan bidang penanggulangan bencana adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas Masyarakat yang tertimpa bencana sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPBD Kabupaten Mamuju pelayanan BPBD Kabupaten Mamuju dalam penyelenggaraan penanganan bencana dapat diidentifikasi berdasarkan kerawanan bencana di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

Tabel 4.9 Data Kebijakan Bencana Dari Tahun 2017-2021

No	Jenis Bencana	Penyebab Kejadian	Persentase Kejadian tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kebakaran	Arus Pendek	1	1	7	-	-
2.	Pohon Tumbang	-	-	-	-	-	-
3.	Banjir	Hujan Deras	1	1	1	2	-
4.	Banjir rop	Pertemuan Air Pasang Laut Dengan Luapan Air Sungai	-	-	-	-	-

5.	Banjir Bandang	Tingginya Debit Air Disebabkan Intensitas Hujan Yang Tinggi	-	-	1	1	1
6.	Kekeringan	-	-	-	-	-	-
7.	Gelombang Pasang	Tingginya Air laut	-	2	-	-	-
8.	Gempa Bumi	-	-	-	-	-	3
9.	Tanah Longsor	-	-	1	2	-	-
10.	Angin Puting Beliung	-	-	-	-	1	-
11.	Angin Kencang	-	-	1	1	-	-
12.	Abrasi	-	-	-	-	2	-
13.	Musibah Perairan	-	-	-	-	-	-
Bencana NonAlam							
14.	COVID-19	Virus	-	-	-	10 Bulan	-
Kerugian			Rp. 16 M	Rp. 27 M	Rp.	Rp.	Rp.829,1M

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Tingkatan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 4 tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum mencapai sasaran secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahunan.

**Table 4.10 Matriks Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Mamuju**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan		
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Langsung	0	146.320.020.000,-	1.122.298.000,-	1.466.698.000,-	1.194.099.216,-	0	2.855.896.000,-	1.587.252.700,-	1.315.949.700,-	1.094.328.930,-	0	94.109	64.419	88.108	70.809	75.000	38.0354.930
2	Belanja Tak Langsung	0	212.268.2371,-	1.799.958.622,-	2.238.274.455.626,-	1.914.455.626,-	0	1.584.897.700	1.438.487.058	1.718.516.086	1.410.516.106	0	93.005	75.005	99.005	71.303	14.2697.6804	1,014,129,1681
3	Belanja Pegawai	0	394.966.000	360.4220.000,-	419.470.000,-	317.830.000	0	237.500.000	266.286.181	237.900.890	40,191,658	0	83,32	87,37	88,27	61,77	1,051,3000	16,183,342
4	Belanja Barang Dan Jasa	0	978.178.000,-	739.528.000,-	862.928.000	847.589.216	0	922.470.000	839.068.925	793.064.343	1.089.212.979	0	72,4	78,5	80,15	77,6	1,088,341,50	85,95479
5	Belanja Modal	0	90.560.000,-	22.350.000,-	184.300.000,-	28.680.000,-	0	1.392.378.000	824.721.927	190.455.505	59,984,360	0	94,64	77,15	80,9%	80%	29,2807,050	28,8110,140

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Tabel 4.11 Sumber Dana Bantuan Dari Masyarakat

No	Donatur	Sumbangan
1.	Masyarakat	Rp. 394. 866. 500,-
Total Bantuan Sebesar		Rp. 394. 866. 500,-

Sumber: BPBD Kabupaten Mamuju

B. Hasil Penelitian

Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan amanah Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB yang merupakan lembaga non kementerian setingkat menteri yang mempunyai fungsi meliputi perumusan penetapan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007) merupakan upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB). Selanjutnya, penyelenggaraan PB merupakan serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana melalui tiga fase, pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.

Upaya penanggulangan bencana merupakan bentuk tanggung jawab kepada negara dalam melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah diterangkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya peran BNPB namun juga diperlukan keterlibatan peran dari Kementerian/lembaga nasional lainnya, lembaga usaha dan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan Tata Kelola Risiko Bencana Dalam Resiliensi Masyarakat Pasca Gempa Di Kabupaten Mamuju dengan empat (4) indikator yaitu Resiliensi masyarakat terhadap Bencana, Resiliensi Pangan, Resiliensi Ekonomi, Resiliensi Sosial dan Kesehatan.

1. Ketekunan (*Perseverance*)

Resiliensi masyarakat terhadap bencana adalah kemampuan suatu masyarakat untuk mengurangi risiko, menanggulangi, dan beradaptasi dengan bencana. Resiliensi ini mencakup berbagai aspek, termasuk kemampuan fisik, ekonomi, sosial, dan institusional untuk menghadapi ancaman bencana.

Resiliensi masyarakat terhadap bencana bukan hanya tentang respons masyarakat saat bencana terjadi, tetapi juga tentang upaya pencegahan, mitigasi, dan persiapan sebelum bencana terjadi. Dengan meningkatkan Resiliensi masyarakat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari bencana dan mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.

Dengan hal ini Resiliensi masyarakat terhadap bencana mengenai tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju. Berikut wawancara penulis dengan ND selaku

sekretaris BPBD Kabupaten Mamuju terkait Resiliensi masyarakat terhadap

Bencana sebagai berikut:

“Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi Resiliensi Masyarakat kami terhadap bencana sudah mengalami peningkatan sejak gempa beberapa waktu lalu. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kami telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan Masyarakat. Salah satu indikator yang dapat kami sampaikan adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang aktif dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana. Pada tahun 2022, jumlah peserta pelatihan kesiapsiagaan bencana mencapai 200 orang, sementara pada tahun 2023, jumlah peserta meningkat menjadi 500 orang. Selain itu, kami juga mencatat peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi program-program pengurangan risiko bencana, seperti penggunaan peta risiko bencana dan pembangunan infrastruktur tahan bencana.” (Wawancara dengan ND pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi masyarakat terhadap Bencana telah melakukan berbagai upaya, antara lain pembangunan posko-posko siaga bencana, pelatihan evakuasi dan penyelamatan, serta pendistribusian alat-alat evakuasi darurat seperti selimut, tenda, dan perlengkapan lainnya. Selain itu, kami juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami tanda-tanda awal bencana dan cara bertindak yang tepat saat terjadi bencana.

Berikut wawancara penulis dengan HD selaku bendahara Dinas Sosial terkait dengan Resiliensi masyarakat terhadap bencana dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju untuk aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan bencana dan sosialisasi program-program pengurangan risiko bencana. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana, sehingga kita dapat lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan yang mungkin datang” (Wawancara dengan HD pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi masyarakat terhadap Bencana Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Resiliensi masyarakat terhadap bencana, antara lain dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana, memastikan tersedianya infrastruktur yang tangguh, serta mengkoordinasikan berbagai stakeholder terkait.

Berikut wawancara penulis dengan EK selaku LSM Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi masyarakat terhadap bencana dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“LSM Kabupaten Mamuju memiliki peran yang penting dalam meningkatkan Resiliensi masyarakat terhadap bencana. Salah satu program utama kami adalah penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang penanganan bencana, evakuasi, dan persiapan dalam menghadapi bencana alam. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam penyusunan rencana tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana” (Wawancara dengan EK pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi masyarakat terhadap Bencana LSM Kabupaten Mamuju memiliki peran yang penting seperti penyuluhan dan pelatihan tentang penanganan bencana alam.

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi masyarakat terhadap bencana

dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi secara berkelanjutan, penyuluhan, pelatihan, serta contoh nyata dari kejadian bencana yang pernah terjadi. Dengan melibatkan masyarakat aktif dalam proses pembangunan Resiliensi terhadap bencana, kesadaran mereka akan semakin meningkat” (Wawancara dengan SA pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi masyarakat terhadap Bencana perlunya peningkatan kesadaran Masyarakat dalam Upaya meningkatkan pengetahuan atau wawasan Masyarakat mengenai Resiliensi terhadap bencana.

Berikut wawancara penulis dengan MR Korban bencana Gempa Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi masyarakat terhadap bencana dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Saya merasakan ketakutan yang luar biasa saat gempa terjadi. Rumah saya hancur dan saya kehilangan banyak barang berharga. Namun, saya bersyukur bisa selamat bersama keluarga. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya persiapan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana” (Wawancara dengan MR pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi masyarakat terhadap Bencana sangat penting persiapan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Resiliensi masyarakat terhadap Bencana Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak terkait, terdapat peningkatan kondisi Resiliensi masyarakat Kabupaten Mamuju terhadap bencana. Salah satu

indikatornya adalah peningkatan jumlah masyarakat yang aktif dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana, dari 200 orang pada tahun 2022 menjadi 500 orang pada tahun 2023. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam sosialisasi program-program pengurangan risiko bencana juga mengalami peningkatan.

LSM Kabupaten Mamuju memainkan peran penting dalam meningkatkan Resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui program-program penyuluhan, pelatihan, dan kerjasama dengan pemerintah setempat. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, penyuluhan, dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan Resiliensi terhadap bencana.

Pengalaman dari korban bencana juga menjadi pelajaran berharga, yang menekankan pentingnya persiapan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan pemerintah, diharapkan dapat terus bekerja sama dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga Kabupaten Mamuju dapat lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan yang mungkin datang.

Kondisi Sebelum Terjadinya Gempa Masyarakat hidup dalam kondisi sosial yang relatif stabil dengan aktivitas sehari-hari berjalan normal. Perekonomian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pertanian, perikanan, dan sektor jasa berjalan lancar. Bangunan seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya dalam kondisi baik dan

fungsional. Layanan publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan berjalan normal.

2. Mencari Bantuan Adaptif (*Seek Adaptive Help*)

Resiliensi pangan bagi bencana gempa adalah kemampuan suatu masyarakat atau individu untuk mempertahankan akses yang aman, memadai, dan bergizi terhadap pangan dalam menghadapi atau pasca terjadinya gempa bumi.

Dalam konteks gempa bumi, Resiliensi pangan menjadi sangat penting karena gempa dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk fasilitas penyediaan pangan. Meningkatkan Resiliensi pangan bagi bencana gempa memerlukan perencanaan yang matang, kerjasama antarinstansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Dengan hal ini Resiliensi Pangan mengenai Tata Kelola Risiko Bencana Dalam Resiliensi Masyarakat Pasca Gempa Di Kabupaten Mamuju. Berikut wawancara penulis dengan ND selaku sekretaris BPBD Kabupaten Mamuju terkait Resiliensi Pangan sebagai berikut:

“Salah satu indikator yang dapat kami sampaikan adalah meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Pada tahun 2022, jumlah rumah tangga tersebut mencapai 70% dari total rumah tangga di Kabupaten Mamuju, sementara pada tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 75%. Selain itu, kami juga mencatat peningkatan jumlah lahan pertanian yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, serta peningkatan produksi pangan lokal seperti beras, jagung, dan sayuran” (Wawancara dengan ND pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Pangan telah melakukan berbagai upaya, antara lain program-program bantuan benih unggul kepada petani, pelatihan teknik pertanian yang ramah lingkungan, dan promosi konsumsi pangan lokal. Selain itu, juga terus menggalakkan program-program diversifikasi pangan dan pengembangan usaha mikro dan kecil di sektor pangan, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bergizi.

Berikut wawancara penulis dengan HD selaku bendahara Dinas Sosial terkait dengan Resiliensi pangan dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki peran penting dalam meningkatkan Resiliensi pangan masyarakat. Kami melakukan berbagai program, seperti penyediaan bantuan pangan bagi korban bencana, pelatihan pertanian berkelanjutan, dan pengembangan kebun-kebun keluarga. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain minimnya akses terhadap teknologi pertanian yang modern, keterbatasan lahan pertanian yang subur, dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Selain itu, masih ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pertanian yang perlu terus ditingkatkan.” (Wawancara dengan HD pada 12 Februari 2024).

Berikut wawancara penulis dengan EK selaku LSM Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi pangan dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Beberapa kendala yang dihadapi antara lain minimnya akses terhadap modal usaha, kurangnya infrastruktur pendukung pertanian, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu,

masih ada juga perluasan lahan pertanian yang sulit dilakukan karena faktor sosial dan ekonomi” (Wawancara dengan EK pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Pangan ada banyak faktor yang menjadi penghambat dalam hal Resiliensi pangan yaitu seperti terhalangnya modal usaha, terbatasnya pendukung pertanian, dan iklim.

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi pangan dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Peran masyarakat sangat penting dalam memperkuat Resiliensi pangan pasca bencana gempa. Masyarakat perlu aktif dalam mengelola lahan pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program pemulihan pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal juga sangat diperlukan” (Wawancara dengan SA pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Pangan Masyarakat Masyarakat perlu aktif dalam mengelola lahan pertanian secara mandiri dan berkelanjutan.

Berikut wawancara penulis dengan MR Korban bencana Gempa Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi pangan dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Kami telah menerima bantuan benih dan pupuk untuk menanam kembali lahan pertanian yang rusak. Selain itu, kami juga mendapatkan pelatihan dalam penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan efisien, serta bantuan program diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan saja” (Wawancara dengan MR pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Pangan Masyarakat telah menerima bantuan pemerintah seperti benih dan pupuk untuk menanam kembali lahan yang rusak.

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Resiliensi Pangan Terjadi peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, serta peningkatan produksi pangan lokal seperti beras, jagung, dan sayuran. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan Resiliensi pangan di Kabupaten Mamuju.

Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki peran penting dalam meningkatkan Resiliensi pangan masyarakat melalui program-program seperti penyediaan bantuan pangan bagi korban bencana, pelatihan pertanian berkelanjutan, dan pengembangan kebun-kebun keluarga.

Masih terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan Resiliensi pangan, seperti minimnya akses terhadap teknologi pertanian yang modern, keterbatasan lahan pertanian yang subur, perubahan iklim, minimnya akses terhadap modal usaha, kurangnya infrastruktur pendukung pertanian, dan kesenjangan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola pertanian.

Partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola lahan pertanian secara mandiri dan berkelanjutan sangat diperlukan. Selain itu, partisipasi dalam program-program pemulihan pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal juga penting untuk memperkuat Resiliensi pangan.

Masyarakat telah menerima bantuan berupa benih dan pupuk untuk menanam kembali lahan pertanian yang rusak, pelatihan dalam penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan efisien, serta bantuan program diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan saja.

3. Pengaruh Negatif dan Respon Emosional (*Negative Affect and Emotional Responses*)

Resiliensi ekonomi bagi bencana gempa adalah kemampuan suatu individu, keluarga, atau masyarakat untuk bertahan secara finansial dan mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh gempa bumi.

Meningkatkan Resiliensi ekonomi bagi bencana gempa memerlukan perencanaan finansial yang matang, pengelolaan risiko yang baik, dan adanya kebijakan yang mendukung untuk membantu masyarakat dalam mengatasi dampak ekonomi dari gempa bumi.

Dengan hal ini Resiliensi Ekonomi mengenai Tata Kelola Risiko Bencana Dalam Resiliensi Masyarakat Pasca Gempa Di Kabupaten Mamuju. Berikut wawancara penulis dengan ND selaku sekretaris BPBD Kabupaten Mamuju terkait Resiliensi Ekonomi sebagai berikut:

“Salah satu indikator yang dapat kami sampaikan adalah meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berhasil bertahan atau bahkan berkembang pasca gempa. Pada tahun 2022, jumlah UMKM yang bertahan mencapai 60% dari total UMKM di Kabupaten Mamuju, sementara pada tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 70%. Selain itu, kami juga mencatat peningkatan pendapatan rata-rata per kapita masyarakat setempat” (Wawancara dengan ND pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Ekonomi Pemerintah Daerah sangat aktif dalam upaya memperkuat Resiliensi ekonomi masyarakat terhadap bencana. Menjalankan program-program peningkatan akses masyarakat terhadap pasar, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, serta peningkatan akses terhadap layanan keuangan mikro. Selain itu, kami juga terus meningkatkan koordinasi antarinstansi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan dukungan yang diperlukan bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Berikut wawancara penulis dengan HD selaku bendahara Dinas Sosial terkait dengan Resiliensi ekonomi dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Pasca bencana gempa, kondisi Resiliensi ekonomi masyarakat Kabupaten Mamuju mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data yang kami miliki menunjukkan bahwa sekitar 70% usaha mikro dan kecil di Kabupaten Mamuju mengalami kerugian atau kerusakan akibat bencana gempa. Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah pengangguran dan menurunnya pendapatan masyarakat secara umum. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain Memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak bencana, Melakukan pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha bagi korban bencana untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka, Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial di daerah tersebut, Memberikan pendampingan dan dukungan psikososial kepada korban bencana untuk memulihkan semangat dan motivasi dalam membangun kembali usaha mereka” (Wawancara dengan HD pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Ekonomi ada beberapa langkah Langkah untuk memperkuat ekonomi Masyarakat

pasca gempa seperti Memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak bencana, Melakukan pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha bagi korban bencana untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka.

Berikut wawancara penulis dengan EK selaku LSM Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi ekonomi dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Gempa mengakibatkan kerusakan pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Menurut data BPS Mamuju, produksi pertanian turun 30%, sementara jumlah wisatawan turun drastis setelah gempa. Tidak hanya itu BPS mencatat tingkat pengangguran naik menjadi 12% pasca gempa dari sebelumnya 8%. Selain itu dari data yang kami peroleh sebanyak 40% UMKM tutup usaha setelah gempa.” (Wawancara dengan EK pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Ekonomi gempa berpengaruh ke beberapa sektor seperti pertanian turun drastis 30% dan Tingkat pengangguran naik menjadi 12% dari sebelum terjadinya gempa.

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi ekonomi dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Data menunjukkan bahwa sekitar 80% dari total masyarakat yang terdampak bencana telah aktif mengikuti program-program pemulihan ekonomi yang diadakan oleh pemerintah dan LSM. Partisipasi ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan hingga pengembangan usaha mikro.” (Wawancara dengan SA pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Ekonomi Masyarakat yang terkena bencana gempa telah aktif kembali mengikuti kegiatan program pemerintah seperti pemulihan ekonomi.

Berikut wawancara penulis dengan MR Korban bencana Gempa Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi ekonomi dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Pasca bencana gempa, kondisi Resiliensi ekonomi kami mengalami banyak kendala. Usaha kecil yang kami miliki hancur dan pendapatan keluarga menurun drastis. Namun, kami berusaha bangkit dengan bantuan dari berbagai pihak untuk memulihkan usaha dan meningkatkan kembali pendapatan keluarga.”
(Wawancara dengan MR pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Ekonomi Masyarakat kehilangan usaha dan menurunnya pendapatan keluarga yang drastic.

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Resiliensi Ekonomi Terjadi peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bertahan atau bahkan berkembang pasca gempa. Pada tahun 2022, jumlah UMKM yang bertahan mencapai 60% dari total UMKM di Kabupaten Mamuju, sementara pada tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 70%. Meskipun terjadi peningkatan jumlah UMKM yang bertahan, kondisi Resiliensi ekonomi masyarakat secara umum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sekitar 70% usaha mikro dan kecil mengalami kerugian atau kerusakan akibat bencana gempa,

menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dan menurunnya pendapatan Masyarakat.

Beberapa langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan antara lain memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, diversifikasi ekonomi, dan dukungan psikososial kepada korban bencana. Gempa juga berdampak pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata dengan produksi pertanian turun 30%, jumlah wisatawan menurun drastis, dan tingkat pengangguran naik menjadi 12% pasca gempa dari sebelumnya 8%. Sebanyak 40% UMKM tutup usaha setelah gempa. Meskipun demikian, terdapat partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat dalam program-program pemulihan ekonomi yang diadakan oleh pemerintah dan LSM, mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro. Masyarakat korban bencana juga aktif dalam upaya pemulihan ekonomi, dengan memanfaatkan bantuan dari berbagai pihak untuk memulihkan usaha dan meningkatkan kembali pendapatan keluarga.

4. Resiliensi Sosial dan Kesehatan

Resiliensi sosial dan kesehatan bagi bencana gempa adalah kemampuan suatu individu, keluarga, atau masyarakat untuk mempertahankan kesehatan fisik dan mental, serta menjaga kesejahteraan sosial dalam menghadapi dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh gempa bumi.

Meningkatkan Resiliensi sosial dan kesehatan bagi bencana gempa memerlukan kerjasama antar individu, keluarga, komunitas, dan pemerintah

dalam membangun kapasitas adaptasi, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan dukungan sosial, serta mempromosikan kesadaran akan risiko dan kesiapsiagaan bencana.

Dengan hal ini Resiliensi Sosial dan Kesehatan mengenai Tata Kelola Risiko Bencana Dalam Resiliensi Masyarakat Pasca Gempa Di Kabupaten Mamuju. Berikut wawancara penulis dengan ND selaku sekretaris BPBD Kabupaten Mamuju terkait Resiliensi Sosial dan Kesehatan sebagai berikut:

“Salah satu indikator yang dapat kami sampaikan adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Pada tahun 2022, jumlah masyarakat yang memiliki akses tersebut mencapai 80% dari total penduduk di Kabupaten Mamuju, sementara pada tahun 2023, persentase ini meningkat menjadi 85%. Selain itu, kami juga mencatat peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara mereka” (Wawancara dengan ND pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Sosial dan Kesehatan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar melalui pembangunan dan perluasan jaringan puskesmas dan posyandu. Selain itu, juga terus menggalakkan program-program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Di samping itu, juga aktif dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara masyarakat.

Berikut wawancara penulis dengan HD selaku bendahara Dinas Sosial terkait dengan Resiliensi sosial dan kesehatan dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Menurut kami, kondisi Resiliensi sosial masyarakat pasca bencana gempa masih dalam tahap pemulihan. Meskipun beberapa infrastruktur telah dibangun kembali, banyak keluarga yang masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal yang layak dan sumber mata pencaharian yang stabil. Fokus utama kami adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi korban bencana gempa, termasuk di dalamnya adalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kami juga berupaya membangun kembali jaringan sosial masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kelompok.” (Wawancara dengan HD pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Sosial dan

Kesehatan Masyarakat kondisi Resiliensi sosial masyarakat pasca bencana gempa masih dalam tahap pemulihan.

Berikut wawancara penulis dengan EK selaku LSM Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi sosial dan kesehatan dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Menurut kami, kondisi Resiliensi sosial masyarakat pasca bencana gempa masih rentan. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fokus utama kami adalah memberikan bantuan bagi keluarga yang terdampak bencana gempa, baik berupa bantuan material seperti tenda dan perlengkapan rumah tangga, maupun bantuan non-material seperti penyuluhan kesehatan dan psikososial. Kami juga berupaya membangun kembali jaringan sosial masyarakat melalui kegiatan gotong-royong dan pertemuan kelompok” (Wawancara dengan EK pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Sosial dan

Kesehatan Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi sosial dan kesehatan dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Menurut saya, kondisi Resiliensi sosial masyarakat Kabupaten Mamuju pasca bencana gempa masih dalam proses pemulihan yang cukup panjang. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk membangun kembali infrastruktur dan memberikan bantuan kepada korban, namun masih banyak tantangan yang dihadapi terutama dalam memulihkan pola interaksi sosial dan keberlangsungan mata pencaharian.” (Wawancara dengan SA pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Sosial dan Kesehatan pasca bencana gempa masih dalam proses pemulihan yang cukup panjang.

Berikut wawancara penulis dengan MR Korban bencana Gempa Kabupaten Mamuju terkait dengan Resiliensi sosial dan kesehatan dalam pengelolaan tata kelola risiko bencana dalam Resiliensi masyarakat pasca gempa di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

“Bencana gempa memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Banyak korban yang mengalami luka-luka akibat reruntuhan bangunan. Selain itu, kondisi sanitasi yang buruk di tenda pengungsian juga meningkatkan risiko penyakit, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Masyarakat melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali Resiliensi sosial dan kesehatan pasca bencana gempa. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu dalam mencari makanan dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka juga aktif dalam kegiatan penyuluhan kesehatan untuk mencegah penyakit menular di tengah kondisi pengungsian” (Wawancara dengan MAA pada 12 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Resiliensi Sosial dan Kesehatan Masyarakat melakukan berbagai Upaya seperti membuat kelompok kecil untuk saling membantu.

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Resiliensi Sosial dan Kesehatan Terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dari 80% pada tahun 2022 menjadi 85% pada tahun 2023. Selain itu, juga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara mereka.

Meskipun beberapa infrastruktur telah dibangun kembali, banyak keluarga yang masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal yang layak dan sumber mata pencaharian yang stabil. Fokus utama adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi korban bencana gempa, termasuk di dalamnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fokus utama adalah memberikan bantuan bagi keluarga yang terdampak bencana gempa, baik berupa bantuan material maupun non-material, serta membangun kembali jaringan sosial masyarakat melalui kegiatan gotong-royong dan pertemuan kelompok. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk membangun kembali infrastruktur dan memberikan bantuan kepada korban, masih banyak tantangan yang dihadapi terutama dalam memulihkan pola interaksi sosial dan keberlangsungan mata pencaharian. Proses pemulihan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Bencana gempa memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti luka-luka akibat reruntuhan bangunan dan risiko penyakit akibat kondisi sanitasi yang buruk di tempat pengungsian. Masyarakat melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali Resiliensi sosial dan kesehatan pasca bencana gempa, seperti membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu dan aktif dalam kegiatan penyuluhan Kesehatan.

Kondisi Sebelum Terjadinya Gempa Masyarakat hidup dalam kondisi sosial yang relatif stabil dengan aktivitas sehari-hari berjalan normal. Perekonomian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pertanian, perikanan, dan sektor jasa berjalan lancar. Bangunan seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya dalam kondisi baik dan fungsional. Layanan publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan berjalan normal.

Banyak bangunan yang dibangun tanpa mempertimbangkan standar tahan gempa. Keadaan alam seperti tanah, sungai, dan hutan dalam kondisi normal tanpa adanya kerusakan berarti. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana relatif rendah, dengan minimnya latihan evakuasi dan penyuluhan tentang mitigasi bencana. Sistem peringatan dini untuk gempa dan tsunami kurang berkembang dan tidak terintegrasi dengan baik.

Kondisi Setelah Terjadinya Gempa Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan harus tinggal di pengungsian sementara. Aktivitas ekonomi terhenti, terutama di sektor pertanian dan perikanan, karena

kerusakan infrastruktur dan lahan. Tingkat stres dan trauma masyarakat meningkat akibat kehilangan harta benda dan orang yang dicintai. Banyak bangunan, termasuk rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan, mengalami kerusakan parah atau runtuh total. Pemerintah dan berbagai organisasi mulai melakukan evakuasi dan memberikan bantuan darurat seperti makanan, air, dan tempat tinggal sementara. Mulai dilakukan perbaikan infrastruktur dan bangunan, dengan fokus pada pembangunan yang lebih tahan gempa. Peningkatan kesadaran dan pelatihan mitigasi bencana bagi masyarakat, serta pengembangan sistem peringatan dini yang lebih baik.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa di Kabupaten Mamuju, Regulasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Mamuju dapat mencakup berbagai aspek seperti Resiliensi masyarakat terhadap Bencana, Resiliensi Pangan, Resiliensi Ekonomi, dan Resiliensi Sosial dan Kesehatan terhadap bencana. Biasanya, regulasi ini disusun untuk mengatur upaya-upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana serta memastikan kesiapan dan respons yang efektif ketika bencana terjadi. menggunakan empat (4) indikator teori yaitu:

1. Ketekunan (*Perseverance*)

Resiliensi masyarakat terhadap bencana adalah kemampuan masyarakat untuk menghadapi, mengurangi risiko, menanggulangi, dan memulihkan

diri dari dampak bencana. Teori ini berfokus pada bagaimana masyarakat dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dan meminimalkan kerugian akibat bencana (Adiyoso, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dari segi Resiliensi masyarakat terhadap Bencana Peningkatan kondisi Resiliensi masyarakat Kabupaten Mamuju terhadap bencana merupakan hal yang positif dan menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait, terutama LSM dan pemerintah setempat. Penyuluhan, pelatihan, dan kerjasama antara LSM dan pemerintah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

Salah satu indikator peningkatan Resiliensi masyarakat terhadap bencana adalah peningkatan jumlah masyarakat yang aktif dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana. Dari data yang diperoleh, terjadi peningkatan signifikan dari 200 orang pada tahun 2022 menjadi 500 orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan minat masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam sosialisasi program-program pengurangan risiko bencana juga mengalami peningkatan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses sosialisasi, mereka dapat lebih memahami pentingnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan dapat ikut berperan aktif dalam melaksanakan program-program tersebut.

2. Mencari Bantuan Adaptif (*Seek Adaptive Help*)

Resiliensi pangan adalah kondisi di mana setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup, aman, dan bergizi makanan yang memenuhi kebutuhan gizi dan preferensi pribadi untuk menjalani kehidupan sehat dan aktif. Konsep Resiliensi pangan ini telah berkembang dari sekadar memastikan ketersediaan pangan menjadi lebih luas, termasuk aspek distribusi, akses, konsumsi, dan stabilitas pangan (Adiyoso, 2015).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Resiliensi Pangan Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki peran penting dalam meningkatkan Resiliensi pangan masyarakat melalui program-program seperti penyediaan bantuan pangan bagi korban bencana, pelatihan pertanian berkelanjutan, dan pengembangan kebun-kebun keluarga. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas.

Meskipun telah terjadi peningkatan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan Resiliensi pangan di Kabupaten Mamuju. Kendala tersebut antara lain minimnya akses terhadap teknologi pertanian yang modern, keterbatasan lahan pertanian yang subur, perubahan iklim, minimnya akses terhadap modal usaha, kurangnya infrastruktur pendukung pertanian, dan kesenjangan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola pertanian. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola lahan pertanian secara mandiri dan berkelanjutan sangat diperlukan.

3. Pengaruh Negatif dan Respon Emosional (*Negative Affect and Emotional Responses*)

Resiliensi ekonomi merupakan kemampuan individu, rumah tangga, komunitas, atau negara untuk bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi, seperti krisis keuangan, fluktuasi harga, atau ketidakpastian ekonomi lainnya. Konsep ini mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan dasar (Adiyoso, 2015).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Resiliensi Ekonomi Peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bertahan atau bahkan berkembang pasca gempa di Kabupaten Mamuju merupakan indikator positif dalam memperkuat Resiliensi ekonomi masyarakat. Data menunjukkan bahwa persentase UMKM yang bertahan meningkat dari 60% pada tahun 2022 menjadi 70% pada tahun 2023. Meskipun demikian, kondisi Resiliensi ekonomi masyarakat secara umum mengalami penurunan yang signifikan akibat bencana tersebut.

Sebagian besar UMKM mengalami kerugian atau kerusakan akibat gempa, yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan, seperti memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, diversifikasi ekonomi, dan dukungan

psikososial kepada korban bencana, sangat penting untuk membantu UMKM dan masyarakat secara keseluruhan dalam memulihkan ekonomi mereka.

4. Resiliensi Sosial dan Kesehatan

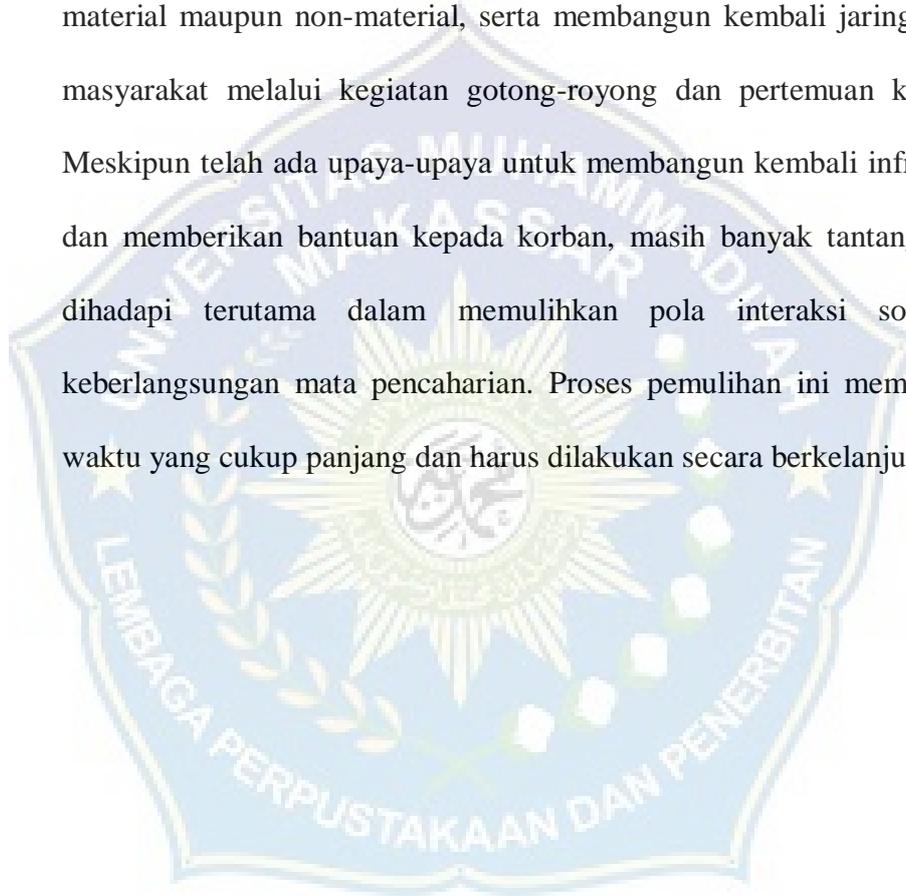
Resiliensi sosial dan kesehatan mencakup kemampuan individu, keluarga, komunitas, dan sistem kesehatan untuk menghadapi tekanan dan mengatasi tantangan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek kesehatan, tetapi juga faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan (Adiyoso, 2015).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Resiliensi Sosial dan Kesehatan Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang memperkuat solidaritas dan kerjasama menunjukkan adanya upaya yang dilakukan untuk memperkuat Resiliensi sosial dan kesehatan masyarakat Kabupaten Mamuju.

Meskipun beberapa infrastruktur telah dibangun kembali, banyak keluarga yang masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal yang layak dan sumber mata pencaharian yang stabil. Fokus utama pemerintah dan LSM adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi korban bencana gempa, termasuk di dalamnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Banyak

keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Upaya-upaya pemulihan yang dilakukan meliputi memberikan bantuan bagi keluarga yang terdampak bencana gempa, baik berupa bantuan material maupun non-material, serta membangun kembali jaringan sosial masyarakat melalui kegiatan gotong-royong dan pertemuan kelompok. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk membangun kembali infrastruktur dan memberikan bantuan kepada korban, masih banyak tantangan yang dihadapi terutama dalam memulihkan pola interaksi sosial dan keberlangsungan mata pencaharian. Proses pemulihan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan harus dilakukan secara berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang terhadap Bencana Alam pada Masyarakat di Kabupaten Mamuju di simpulkan bahwa: a) Ketekunan (*Perseverance*), terhadap peningkatan jumlah masyarakat yang aktif dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi program program pengurangan risiko bencana. b) Mencari Bantuan Adaptif (*Seek Adaptive Help*), peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, serta peningkatan produksi pangan lokal seperti beras, jagung, dan sayuran. c) Pengaruh Negatif dan Respon Emosional (*Negative Affect and Emotional Responses*), terjadi peningkatan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bertahan atau berkembang pasca gempa di Kabupaten Mamuju. Hal ini terlihat dari persentase UMKM yang bertahan meningkat dari 60% pada tahun 2022 menjadi 70% pada tahun 2023. d) Resiliensi Sosial Dan Kesehatan beberapa infrastruktur telah dibangun kembali, masih banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal yang layak dan sumber mata pencaharian yang stabil.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan maka Penulis perlu untuk menambahkan informasi berikut setelah mempertimbangkan dan menganalisa

kesimpulan yang dinyatakan di atas dan hasil diskusi pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Mamuju atau instansi terkait untuk meningkatkan Resiliensi masyarakat terhadap bencana. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan program-program yang sudah ada, peningkatan alokasi anggaran, atau pengembangan kebijakan baru yang lebih efektif.
2. penguatan infrastruktur di Kabupaten Mamuju, seperti pembangunan shelter atau rumah tahan gempa, perbaikan jaringan komunikasi dan transportasi, serta pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif.
3. Rekomendasi lainnya adalah terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dan pengetahuan tentang bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program sosialisasi, edukasi, dan pelatihan yang lebih intensif.
4. Penting juga untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam upaya membangun Resiliensi masyarakat terhadap bencana. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana.
5. Terakhir, penulis dapat merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, misalnya mengenai dampak perubahan iklim terhadap risiko bencana di Kabupaten Mamuju atau evaluasi implementasi rekomendasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen bencana: Pengantar dan isu-isu strategis*. Bumi Aksara.
- Agustina, S., Susniwati, S., & Barokah, R. A. (2023). Pengaruh Efektivitas Dan Kualitas Pelayanan Balik Nama Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Pertanahan Kota Bandung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1385-1399.
- Ashari, M. R., & Firmansyah, F. (2024). Edukasi Mitigasi Bencana Dalam Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan Di SD Inpres 1 Talise Kota Palu. *Jurnal Dedikatif Kesehatan Masyarakat*.
- Alta, A., Prabowo, A., Firdaus, A. H., Murwani, A., Fauzi, A. N., Arifin, B., ... & Amir, M. F. (2023). *Memodernisasi Pertanian Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Murai Kencana.
- Bayu Pradana. (2020). Budaya Komentor Dalam Praktik Pemberitaan Di Media Sosial Instagram Mojokdotco (Perspektif Komunikasi Islam).
- Bencana, B. N. P. (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. *BNPB, Jakarta*.
- Cassidy, S. (2015). Resilience building in students: The role of academic self-efficacy. *Frontiers in psychology*, 6, 1781.
- Devi, S. (2021). *Manajemen Penanggulangan Bencana Oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Medan Denai Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Fawzi, E. R., Ketaren, O., & Sitorus, M. E. (2023). Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Banjir Studi Kualitatif di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2022. *Jurnal Ners*, 7(2), 1055-1067.
- Fariza, A., & Handayani, B. L. (2022). Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2).
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju. *GROWTH jurnal ilmiah ekonomi pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Halim, A. (2022). Analisis Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Mamuju. *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1(2), 59-69.
- Harahap, P. S., & Prabowo, T. J. W. (2023). Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2021). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(2).
- Hidayati, D. A., Mulyaningsih, H., & Damayanti, A. (2023). Kapasitas Mitigasi Sebagai Bentuk Resiliensi Masyarakat Miskin Perkotaan Dalam Menghadapi

- Bencana Covid-19. *Wacana Publik*, 17(1), 29-35.
- Irawan, I., Subiakto, Y., & Kustiawan, B. (2022). Manajemen Mitigasi Bencana Pada Pendidikan Anak Usia Dini untuk Mengurangi Risiko Bencana Gempa Bumi. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(2), 609-615.
- Langitan, R. E., Agusrianto, A., Oktavia, D. S., & Manggasa, D. D. (2022). Edukasi mitigasi bencana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi. *Madago Community Empowerment for Health Journal*, 1(2), 40-45.
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan strategi indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung Resiliensi nasional. *Jurnal Resiliensi Nasional*, 25(3), 295-312.
- Marwan, M. (2022). Analisis Tingkat Ketangguhan Bencana Kelurahan Kastela Kota Ternate (Studi Kasus Pandemi Covid 19). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(1).
- Mahtari, S., Wibowo, F. C., Kh, M. R., Baranova, N. A., Alekseev, D. A., & Lobkovsky, L. I. (2022). *Journal of Tsunami Society International*.
- Miola, E., & Marques, F. P. J. (2022). Government communication and online engagement during “the summer of Zika”: Examining content and social media metrics of posts addressing the *Aedes aegypti* mosquito. *First Monday*.
- Nurkadri, M. (2022). Edukasi Multi Disaster Pencegahan Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Persekolahan. *Spirit Peningkatan Skill Dan Pembangunan Fisik*, 111.
- Nurwulandari, F. S., Pirngadi, B. H., Rismana, G. A., Nurhasbi, P. F., Febrianti, A. D., & Putri, A. E. (2023). Perancangan Peta Ancaman Bencana Dan Peta Kapasitas Bencana Sebagai Pendukung Informasi Bagi Desa Wisata Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1456-1467.
- Pinasti, S. A., Ummi, A. Y., Azzahro, A. K., & Kamal, U. (2024). Penanganan Banjir di Kota Semarang Guna Menjamin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Teori Welfare State. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 95-108.
- Pranoto, N. W., Chaeroni, A., Irawan, R., & Rahmad, A. (2022). Pendidikan Mitigasi Bencana Pada Pokdarwis Di Desa Tua Pejat Kepulauan Mentawai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Olahraga Dan Kesehatan (Jaso)*, 2(2), 38-43.
- Rahmawati, I., & Rahmawati, A. (2022). *Mengenal Psikologi Bencana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wiyanti, D. S., Laksono, T. D., & Barkah, A. (2023). Konstruksi Bangunan Terkait Potensi Gempa Di Indonesia. *Wikuacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 21-26.

L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara dengan Sekertaris BPBD Kabupaten Mamuju



wawancara dengan bendahara Dinas Sosial Kabupaten Mamuju



Wawancara dengan tokoh masyarakat



Wawancara dengan korban bencana



Dokumentasi Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju 15 Januari 2021



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3269/05/C.4-VIII/I/1445/2024

09 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

27 Jumadil akhir 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Mamuju

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Selatan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0047/FSP/A.1-VIII/I/1445/2024 tanggal 9 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DIAN ALFIANI

No. Stambuk : 10564 1108220

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TATA KELOLA RISIKO BENCANA DALAM KETAHANAN MASYARAKAT PASCA GEMPA DI KABUPATEN MAMUJU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Januari 2024 s/d 12 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

	<p>Universitas Muhammadiyah Makassar Integrity · Professionalism · Entrepreneurship</p>	<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences Menara Iqra Lama 3, Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: 0411) 866 972 Fax: 0411) 863 588 Official Email: fisp@unismuh.ac.id Official Web: https://fisp.unismuh.ac.id</p>
---	--	--

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0047/FSP/A.1-VIII/1445 H/2024 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Dian Alfiani
St a m b u k : 10564 11082 20
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju
Judul Skripsi : *“Tata Kelola Risiko Bencana dalam Ketahanan Masyarakat Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 09 Januari 2024
Ketua Jurusan IP

Ahmad Harakan, S.I.P.M.H.I
NBM 1207163

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP3M)
PERPUSTAKAAN DAFTAR PUSTAKA



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91312, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptapsulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00050/76.RP.PTSP.B/1/2024

1. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
2. Menimbang : Surat Dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 3269/05/C.4-VII/1/1445/2024 Tanggal 09 Januari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : **DIAN ALFIANI**
 b. NIM : 105641108220
 c. Alamat : Rawamangun, Kcc. Sampaga
 d. No.HP : 085325776963
 e. Untuk :
- 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
**" TATA KELOLA RISIKO BENCANA DALAM
 KETAHANAN MASYARAT PASCA GEMPA DI
 KABUPATEN MAMUJU "**
 - 2). Lokasi Penelitian : BPBD, Dinas Sosial
 Kabupaten Mamuju, Lembaga
 Swadaya Masyarakat
 - 3). Waktu/Lama Penelitian: **29 Januari s/d 29 Februari
 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

Biaya Rp. 0



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Andi DAI No. Telp. (0426) Mamuju-Sulbar Kode Pos 91511

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 360/ 23 /III/2024/BPBD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. TASLIM SUKIRNO, SE.,MM**
 NIP : 19801022 201001 1 012
 Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina / IV /a
 Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD
 Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Mamuju

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **DIAN ALFIANI**
 NIM : 105641108220
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan Pada Universitas Muhammadiyah
 Makassar
 Alamat : Rawamangun Kecamatan Sampaga
 NO HP : 085325776963

Benar telah selesai melakukan penelitian di Badan penanggulangan Bencana Daerah selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 Februari 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"TATA KELOLA RISIKO BENCANA DALAM KETAHANAN MASYARAKAT PASCA GEMPA DI KABUPATEN MAMUJU"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Mamuju, 4 Maret 2024
 Kalaksa BPBD



MUH. TASLIM SUKIRNO, SE., MM
 Pangkat : Pembina/ IV/a
 NIP : 19801022 201001 1 012



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Dian Alfian
Nim : 105641108220
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	1 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 5 Juli 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Narasimha, S.H., M.I.P
NBM 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Dian Alfiani 105641108220 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jiap.ub.ac.id

Internet Source

4%

2

www.oganilirkab.go.id

Internet Source

3%

3

sulbar.tribunnews.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Dian Alfiani 105641108220 Bab II

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	fdokumen.id Internet Source	5%
3	repository.umrah.ac.id Internet Source	2%
4	makassar.lan.go.id Internet Source	2%
5	spada.uns.ac.id Internet Source	2%
6	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uma.ac.id Internet Source	2%
8	yankes.kemkes.go.id Internet Source	2%

Dian Alfiani 105641108220 Bab III

ORIGINALITY REPORT

1 %	1 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	idalamat.com Internet Source		1 %
----------	--	--	------------

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



Dian Alfiani 105641108220 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

9%	11%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
2	dinaspupr.mamujukab.go.id Internet Source	3%
3	mitigasitarakankota.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Dian Alfiani 105641108220 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lib.ui.ac.id

Internet Source

3%

2

Fembriarti Erry Prasmatiwi, Irham Irham, Any Suryantini, Jamhari Jamhari. "Sustainability Analysis of Coffee Farming in Protected Forest of West Lampung Based on Environmental Economic Value", Pelita Perkebunan (a Coffee and Cocoa Research Journal), 2010

Publication

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP PENULIS



DIAN ALFIANI, Lahir pada tanggal 06 Maret 2001 di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sahrudin dan ibu Murni. Penulis menyelesaikan Pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) Inpres Bunde dan lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sampaga lulus pada tahun 2016, dan kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sampaga lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2024, penulis dikukuhkan dengan gelar (S.IP) dengan judul skripsi “Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Alam Gempa Di Kabupaten Mamuju”. Dan pernah mengikuti Darul Aqam Dasar (DAD) di Pusdiklat Unismuh Makassar tahun 2021.